

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS SOSIAL PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



DI SUSUN OLEH :

LIDIA SANDI
10875004508

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2012

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS SOSIAL PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Oleh :

LIDIA SANDI
NIM. 10875004508

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pengawasan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan efektif? dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas pengawasan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Indragiri Hilir?. kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, queisioner, dan wawancara. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu suatu teknik analisa data dengan cara menggambarkan fenomena keadaan yang ditemui dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, efektifitas pengawasan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama dilihat dari proses pelaksanaan pengawasan, yaitu menetapkan alat ukur atau standar, melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan dilihat dari sumber daya manusia, biaya atau dana, dan fasilitas. dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indikator penelitian yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana dalam kategori cukup baik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERSEMBAHAN
ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	11

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1. Efektifitas	14
2.2. Pengawasan	17
2.3. Peraturan Pengawasan	26
2.4. Pemberdayaan Fakir Miskin	29
2.5. Dinas Sosial	32
2.6. Hipotesis	34
2.7. Kerangka Berfikir	34
2.8. Konsep Operasional.....	36
2.9 Teknik Pengukuran.....	38
2.10 Variabel Penelitian	43

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
3.1.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
3.2.	Jenis dan Sumber Data	45
3.3.	Populasi dan Sampel.....	46
3.4.	Metode Pengumpulan Data	47
3.5.	Analisa Data	48
BAB IV	GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
4.1.	Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir	49
4.2.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial	50
4.3.	Visi dan Misi Dinas Sosial	66
4.4.	Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	68
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1.	Identitas Responden	71
a.	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
b.	Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur	72
c.	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.	73
d.	Identitas Responden Berdasarkan Pangkat	74
e.	Identitas Responden Berdasarkan Lama Bertugas	75
5.2.	Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir.....	75
a.	Menetapkan alat ukur (standar).....	77
b.	Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi.....	85
c.	Melakukan Tindakan Perbaikan.....	96
5.3.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir.....	104
a.	Sumber Daya Manusia	105
b.	Dana/biaya.....	109
c.	Fasilitas.....	113

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	119
6.2. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Kelompok Usaha Bersama Tahun 2004 s.d 2009 di Kabupaten Indragiri Hilir	4
Tabel 1.2	Nama Dan Jenis Kegiatan Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2004-2009.....	6
Tabel 2.1	Nama Kelompok dan Besar Bantuan Dana Yang Diberikan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	32
Tabel 2.2	Variabel Penelitian	44
Tabel 5.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
Tabel 5.2	Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur	72
Tabel 5.3	Identitas Respdnen Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	73
Tabel 5.4	Identitas Responden Berdasarkan Pangkat atau Golongan .	74
Tabel 5.5	Identitas Responden Berdasarkan Lama Bertugas	75
Tabel 5.6	Tanggapan Responden Terhadap Pebagian Tugas Secara Jelas yang Dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	78
Tabel 5.7	Tanggapan Responden Tentang Mutu Pengawasan Setelah Adanya Pembagian Tugas Secara Jelas yang Dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupeten Indragiri Hilir	79
Tabel 5.8	Tanggapan Responden Terhadap Adanya Waktu Pencapaian Tujuan Yang di Tetapkan oleh Dinas Sosial Kabupeten Indragiri Hilir	80
Tabel 5.9	Tanggapan Responden adap Mutu Pengawasan setelah ditetapkannya Waktu Pencapaian Tujuan oleh Dinas Sosial KabupetenTerh Indragiri Hilir.....	81
Tabel 5.10	Tanggapan Responden Mengenai Adanya Biaya untuk Pencapaian Tujuan Pengawasan oleh Dinas Sosial Kabupeten Indragiri Hilir	82
Tabel 5.11	Tanggapan Responden Terhadap Mutu Pengawasan setelah Adanya Biaya Untuk Pencapaian Tujuan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupeten Indragiri Hilir.....	83
Tabel 5.12	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menetapkan Alat Ukur (Standar) Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama.....	84

Tabel 5.13	Tanggapan Responden Mengenai Laporan Tertulis Dalam Pengawasan yang Dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	86
Tabel 5.14	Tanggapan Responden tentang Mutu Pengawasan Setelah Adanya Laporan Tertulis yang Dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	87
Tabel 5.15	Tanggapan Responden Mengenai Kunjungan Langsung yang Dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	88
Tabel 5.16	Tanggapan Responden Terhadap Mutu Pengawasan Setelah Adanya Kunjungan Langsung Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	90
Tabel 5.17	Tanggapan Responden Mengenai Pengamatan Hasil Kinerja yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama	91
Tabel 5.18	Tanggapan Responden mengenai Mutu Pengawasan Setelah Pengamatan Hasil Kinerja Dari Kelompok Usaha Bersama Yang Dilakukan Oleh Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	93
Tabel 5.19	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi dalam Pengawasan yang Dilakukan Oleh Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama	95
Tabel 5.20	Tanggapan Responden tentang Pemberian Teguran Dan Peringatan Terhadap Penyimpangan Oleh Kelompok Usaha Bersama Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	97
Tabel 5.21	Tanggapan Responden Terhadap Mutu Pengawasan Setelah Pemberian Teguran Dan Peringatan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama.....	98
Tabel 5.22	Tanggapan Responden Tentang Tindakan Perbaikan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	99
Tabel 5.23	Tanggapan Responden Tentang Mutu Pengawasan Setelah adanya Tindakan Perbaikan Terhadap Kelompok Usaha Bersama Yang Dilakukan Oleh Kelompok Usaha Bersama Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	101

Tabel 5.24	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Melakukan Tindakan Perbaikan Terhadap Kelompok Usaha Bersama Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	102
Tabel 5.25	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator-indikator Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama	103
Tabel 5.26	Tanggapan Responden mengenai Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	106
Tabel 5.27	Tanggapan Responden mengenai Kuantitas Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	107
Tabel 5.28	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	109
Tabel 5.29	Tanggapan Responden mengenai Biaya Operasional yang Dianggarkan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.	110
Tabel 5.30	Tanggapan Responden Tentang Biaya Operasional yang Berikan Dalam Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	112
Tabel 5.31	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Dana/Biaya Dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada kelompok Usaha Bersama.	113
Tabel 5.32	Tanggapan Responden mengenai Fasilitas Yang Diberikan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	114
Tabel 5.33	Tanggapan Responden Mengenai Kendaraan Operasional Yang Berikan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	115
Tabel 5.34	Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Fasilitas Yang Diberikan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	116
Tabel 5.35	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Variabel Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Pada Kelompok Usaha Bersama	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi obyektif masyarakat yang ditandai oleh adanya rasa aman, ketentraman, keselamatan dan kebahagiaan lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

Prinsip otonomi yang diatur dalam UU.No 32 adalah otonomi nyata dan bertanggungjawab. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dibidang tertentu, yang secara nyata dan ada diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan dan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam pencapaian otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Krisis yang terjadi diberbagai bidang kehidupan saat ini, terutama krisis ekonomi global telah menimbulkan berbagai dampak permasalahan yang sangat luas dibidang kesejahteraan, dimana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukan kecenderungan yang meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Laju pembangunan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir juga menimbulkan dampak negatif khususnya dibidang kesejahteraan sosial, seperti bertambahnya pendatang yang berkategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Demikian pula halnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berpengaruh pada perilaku dan sikap masyarakat, terutama generasi muda yang belum siap mencegah pengaruh buruk (*Cultural Lag*), yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan dibidang Kesejahteraan Sosial.

Sasaran yang hendak dicapai dalam meningkatkan masalah kesejahteraan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :

1. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui program bidang sosial.
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam membangun daerahnya.
3. Membentuk jaringan sosial dari organisasi sosial, dunia usaha dan pemerintah.
4. Menggali, mengembangkan dan mendayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
5. Melakukan pembinaan dan pengembangan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

6. Melakukan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
7. Menyusun perencanaan bidang sosial dalam usaha mencegah, mengendalikan dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial.
8. Menyelenggarakan kerjasama bidang sosial.

Dalam hal ini Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sasaran tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial.

Salah satu bentuk bantuan kesejahteraan yang diberikan oleh Dinas Sosial adalah berbentuk sebuah usaha dimana yang dilakukan oleh kelompok yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dalam hal ini Dinas Sosial telah banyak memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang dirasa

kurang mampu dan mempunyai potensi untuk menjalankan suatu usaha. Dapat dilihat dari tabel 1.1. di bawah ini yang mendapatkan bantuan.

Tabel 1.1.
Perkembangan Kelompok Usaha Bersama Tahun 2004 s.d 2009 di
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Jumlah KUBE	Keterangan	
			Masih Ada	Gagal
1	Kemuning	9	5	4
2	Keritang	38	22	16
3	Tempuling	39	26	13
4	Tembilahan Hulu	40	30	10
5	Mandah	11	5	6
6	Tembilahan	49	30	19
7	GAS	6	4	2
8	Reteh	38	25	13
9	Kuindra	7	1	6
10	Batang Tuaka	5	5	-
11	Enok	5	4	1
12	Gaung	8	3	5
13	Pulau Burung	12	8	4
14	Kempas	2	-	2
15	Kateman	3	3	-
Jumlah		272	171	101

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Kelompok Usaha dari tahun 2006 s.d 2009 berjumlah 272 Kelompok Usaha Bersama. Dimana dari kelompok diatas adanya terdapat kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mengalami kegagalan dan ada juga terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang masih menjalankan usahanya sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi kelompok tersebut.

Kelompok yang mengalami kegagalan dapat dilihat dari tabel diatas sebanyak 101 Kelompok Usaha Bersama, dimana Kelompok-kelompok itu terdiri dari berbagai kecamatan, dan Kelompok Usaha yang paling banyak mendominasi adalah Kelompok Usaha yang berada di Kecamatan Tembilahan yang mana di Kecamatan Tembilahan ini jumlah Kelompok Usahnya berjumlah 49 Kelompok, dimana Kelompok yang masih ada berjumlah 30 dan kelompok yang mengalami kegagalan berjumlah 19 Kelompok Usaha Bersama.

Dari keseluruhan total KUBE yang ada di Kabupaten indragiri Hilir yang berjumlah 272 banyak diantaranya yang mengalami kegagalan yaitu 101, untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan disajikan data tentang nama-nama kelompok usaha bersama, jenis usaha, dan keterangan tentang usaha bersama baik yang masih ada maupun yang mengalami kegagalan, yaitu:

Tabel 1.2.
Nama Dan Jenis Kegiatan Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2004-2009

No	Jenis Usaha	Jumlah KUBE	Keterangan		Persentase %	
			Ada	Gagal	Ada	Gagal
1	Perikanan	14	11	3	78,6	21,4
2	Pertanian	44	26	18	59,1	40,9
3	Perbengkelan	28	18	10	64,3	35,7
4	Pertukangan	27	19	8	70,4	29,6
5	Peternakan	57	39	18	68,4	31,6
6	Nelayan	33	15	18	45,4	54,6
7	Peraabot	9	4	5	44,4	55,6
8	Bengkel las	10	4	6	40	60
9	Cucian kendaraan	3	2	1	66,7	33,3
10	Menjahit	4	2	2	50	50
11	Pembuatan Kerupuk	1	-	1	-	100
12	Reklame	1	-	1	-	100
13	Perkebunan	7	4	3	57,1	42,9
14	Pembuatan Tahu	1	-	1	-	100
15	Rumah makan	1	1	-	100	1
16	Counter HP	3	1	2	33,3	66,7
17	Pencarian Kayu bakar	1	1	-	100	-
18	Industri kue kering	1	1	-	100	-
19	Batako	1	1	-	100	-
20	Konveksi border	1	1	-	100	-
21	Makanan ringan	4	4	-	100	-
22	Pengrajin Gula merah	1	1	-	100	-
23	Pengelolaan kelapa kering	4	2	2	50	50
24	Penampungan pasir dan kayu	1	1	-	100	-
25	Minuman air buah	2	1	1	50	50
26	Pembuatan roti	1	1	-	100	-
27	Kue	1	1	-	100	-
28	Sembako	4	4	-	100	-
29	Penjualan mebel	1	1	-	100	-
30	Makanan gorengan	1	1	-	100	-
31	Arang tempurung	1	1	-	100	-
32	Pedagang pinang	2	2	-	100	-
33	Atap daun dan itik petelor	1	-	1	-	100
34	Jualan sate	1	1	-	100	-
Jumlah		272	171	101	62,9	37,1

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui nama-nama kelompok usaha bersama yang masih ada dan yang mengalami kegagalan. Dari tabel tersebut juga bisa diketahui persentase KUBE yang masih ada, yaitu sebanyak 171 atau 62,9%, dan KUBE yang mengalami kegagalan sebanyak 101 atau 37,1% dari total 272 KUBE yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Melihat besarnya persentase kegagalan KUBE maka diperlukan pengawasan dinas sosial kabupaten indragiri hilir dalam menjaga dan mengevaluasi hasil kerja KUBE agar tidak terjadi lagi kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam Kelompok Usaha Bersama.

Selain itu adanya ketidaktransparanan dalam hal dana seperti pernahnya terjadi pemotongan dana yang dilakukan oleh pendamping disalah satu desa yaitu Lahang Hulu dimana pemotongan itu sangat mengganggu kinerja usaha yang dilakukan masyarakat. Apalagi pemotongannya cukup besar, hingga sangat merugikan masyarakat yang tergabung di dalam Kelompok Usaha Bersama tersebut.

Melihat keterangan diatas diperlukannya untuk melakukan pengawasan yang lebih baik agar tercapainya kesejahteraan sosial dikalangan masyarakat yang kurang mampu, maka dari itu diperlukannya peran dari Dinas Sosial untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Pengawasan merupakan salah satu yang penting dilakukan dan dengan melakukan pengawasan kita dapat mengetahui apakah suatu pekerjaan itu berjalan dengan lancar atau tidak apabila terdapat kesalahan dapat memperbaikinya segera mungkin.

Penyelenggaraan aktifitas yang berada pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memerlukan suatu pengawasan dari instansi yang berwenang, agar Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam mengawasi kegiatan yang berlangsung Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut.

Pengawasan akan berlangsung efektif apabila memiliki berbagai ciri sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud adalah teknik pengawasan harus sesuai dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
- b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Maksudnya pengawasan harus mampu mendeteksi deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan.
- c. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Prinsip ini pada dasarnya berarti bahwa karena aneka ragam kegiatan dan luasnya cakupan tanggung jawab, seseorang manajer harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu dilakukannya sendiri dan kegiatan apa pula yang sebaliknya didelegasi kepada orang lain.

- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Salah satu komponen yang harus jelas terlihat dalam rencana ialah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional.
- e. Keluwesan pengawasan. Maksudnya adalah pengawasan harus bersifat fleksibel.
- f. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.
- g. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Oleh karena itu pengawasan sendiri harus segera diselenggarakan dengan tingkat efisiensi yang tinggi pula.
- h. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Maksudnya para manajer selaku pelaksana kegiatan pengawasan harus dapat menentukan teknik pengawasan bagaimana yang dibutuhkan, dan alat bantu apa saja yang perlu dikuasai.
- i. Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Artinya pengawasan yang baik harus menemukan apa yang salah dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut.
- j. Pengawasan harus bersifat membimbing. Berarti pengawasan yang tidak berakibat pada kondisi ketika para bawahan selalu diancam dengan hukuman setiap kali ia berbuat kesalahan. (S.P Siagian, 2004:130)

Dengan adanya pengawasan yang berhasil guna dan berdaya guna akan dapat dihindari pula terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma

yang berlaku, dan dapat diambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi didalam pelaksanaan tugas. Hal ini sesuai dengan pengertian pengawasan yaitu sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil / prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar / rencana yang telah ditentukan maka akan segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil yang dicapai sesuai dengan rencana.

Atas permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang muncul adalah “Bagaimanakah Efektifitas Pengawasan Dinas Sosial dalam rangka untuk menciptakan Kesejahteraan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini fokus utama adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik meneliti tentang **“Analisis Efektifitas Pengawasan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Indragiri Hilir”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas permasalahan yang berhubungan dengan Efektifitas Pengawasan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten Indragiri Hilir. penulis memfokuskan penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pengawasan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan efektif?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas pengawasan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam suatu Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
2. Memberikan informasi kepada pemerintah terkait (Dinas Sosial) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam pokok pembahasan (Bab) dari masing-masing bab ini dibagi dalam beberapa sub-sub sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Manfaat Penulisan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

2.2 Pengertian Pengawasan

2.3 Peraturan Pengawasan

2.4 Pemberdayaan Fakir Miskin

2.5 Dinas Sosial

2.6 Hipotesis

2.7 Kerangka Berfikir

2.8 Konsep Operasional

2.9 Teknik Pengukuran

2.10 Variabel Penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan waktu penelitian

3.2 Jenis dan Sumber Penelitian

3.3 Populasi dan Sampel

3.4 Metoda Pengumpulan Data

3.5 Teknik Analisi Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosi.
- 4.3 Visi dan Misi Dinas Sosial.
- 4.4 Stuktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Sosial Kab. Inhil.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

- 5.1 Identitas Responden
- 5.2 Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Indragiri Hilir.
- 5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Indragiri Hilir

BAB VI : PENUTUP

- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Saran

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Efektifitas.

Efektivitas menurut Sumaryadi (2005:105) adalah seberapa baik pekerjaan itu dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang di rencanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya.

Menurut SP. Siagian (2002:151) efektif adalah tercapainya sasaran yang ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu.

Mulyasa (2002:83) mengatakan efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.

Efektivitas suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan, berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan (Kumorotomo:2005:362).

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian

tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efisien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumberdaya (input) baik, tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya adanya pemborosan sumber daya atau penghambur-hamburan sumber daya tanpa mencapai sasaran. Efisiensi harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif.

Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (input) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitasnya akan juga tidak setinggi yang diharapkan.

Lippman dan Hoeh dalam Mulyasa (2002:83) mengemukakan efektivitas merupakan suatu kegiatan dari faktor untuk pencapaian tujuan, yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi. Suatu organisasi dan lembaga dikatakan efektif meskipun individu didalamnya dapat dipenuhi.

Selanjutnya menurut Richard M Steers (2000:154) bahwa efektivitas organisasi mudah dimengerti bila dipandang sebagai kemampuan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuannya adalah:

- a. Kemampuan menyesuaikan diri (keluwesan)
- b. Produktivitas.
- c. Kemampuan kerja.
- d. Kemampuan berlabar.
- e. Mencari sumberdaya.
- f. Kualitas kerja

Lubis (1998:56) mengatakan bahwa untuk mengukur efektivitas bisa digunakan berbagai faktor / pendekatan lain :

- a. Pendekatan sasaran (*goal approach*) yakni dalam mengukur efektivitas memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan.
- b. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansasi yang baik.
- c. Pendekatan proses (*proses approach*) melihat kegiatan internal organisasi dan mengukur efektivitas melalui berbagai indikator internal seperti efisiensi ataupun iklim organisasi.

2.2 Pengawasan

Menurut Hanry Fayol dalam Inu Kencana (2006:82), pengawasan merupakan ketepatan dalam apapun persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu : pertama pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dan yang kedua pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (Sondang P. Siagian, 2006:115)

Handoko (2005:149) merumuskan pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merencanakan sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

George R. Terry (2000,181) Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap satu keseimbangan kerja diantara anggota lainnya. Tujuannya adalah

supaya seorang pemimpin mendapatkan gambaran tentang suatu keseimbangan kerja diantara anggota lainnya.

S.P Siagian (2004:125) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dan perencanaan mempunyai hubungan yang erat. Penetapan perencanaan meupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian jelas dikatakan bahwa tanpa perencanaan pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut. dan sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang seiring tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan juga bisa diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Menurut Sujamto (2004;12) pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Menurut rachmawati (2009:10) pelaksanaan pengawasan mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Pengawasan merupakan aktifitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Tujuan dari pengendalian atau pengawasan adalah memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai.

Menurut Irawan (2000:252), berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan menjadi :

- a. Pengawasan preventiv adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan dilakukan.
- b. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Menurut Winardi (2000;161) faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan adalah :

1. Sasaran individu dan organisatoris biasanya berbeda (adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja kearah sasaran-sasaran organisatoris).
2. Pengawasan diperlukan dikarenakan terdapat adanya suatu keterlambatan antara waktu sasaran dan sewaktu mereka direalisasikan.

Menurut Sastrohardiwiryo (2002;26) bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rencana yang telah tetap. Arti pentingnya pengawasan adalah :

1. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan aman, dan mengikuti setiap proses dan petunjuk mengenai karya yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
2. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dengan tingkat resiko tugas.
3. Pengawas diikutsertakan dalam melaporkan dan menyelidiki pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan, sasaran-sasaran kepada pengurus.
4. Pengawas ikut serta dalam mengidentifikasi penyimpangan kerja.

Beberapa asas-asas pengawasan menurut Harold Kots dan C'O Donell dalam Melayu (2005;243) yaitu:

1. Pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan.
2. Pengawasan itu efisien jika dapat menghindari penyimpangan dalam rencana.
3. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika pemimpin bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
5. Teknik kontrol yang paling baik adalah mengusahakan adanya pemimpin dan bawahan yang berkualitas.

6. Pengawasan harus dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana
7. Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi
8. Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan pemimpin.
9. Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai.
10. Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam organisasi.
11. Efisien dalam pengawasan langsung membutuhkan adanya perhatian.
12. Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan dari pelaksanaan rencana.
13. Sistem pengawasan harus ditinjau berulang kali untuk mencapai tujuan.

Menurut Sadili Samsudin (2006:299) pengawasan adalah kegiatan manajemen dalam mengadakan pengamatan terhadap :

1. Sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.
2. Sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan organisasi.
3. Pasaran sumberdaya manusia yang ada memungkinkan.
4. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan yang ada di pasaran
5. tenaga kerja.
6. Kemampuan individual dari setiap sumber daya manusia dalam organisasi.

7. Upaya meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam organisasi.
8. Semangat kerja sumber daya manusia, dan sebagainya.

Menurut Herujito (2004;96) langkah-langkah pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar pelaksanaan dan metode yaitu berupa standar waktu, fisik/kualitas dan standar keuangan.
- b. Mengukur prestasi kerja yaitu dapat dilakukan melalui observasi, pengujian atau laporan tertulis.
- c. Membandingkan standar dengan hasil pelaksanaan kegiatan yaitu menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.
- d. Mengambil tindakan koreksi.

Dengan memperhatikan berbagai aspek pengawasan sumberdaya manusia perlu adanya ketentuan-ketentuan standar minimal dalam berbagai aspek tolak ukur. Tolak ukur semacam ini penting untuk memungkinkan sasaran-sasaran yang diinginkan pada setiap aspek dapat dicapai dengan baik dan terkendali.

Adapun teknik pengawasan menurut S.P Siagian (2003:115) adalah :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu teknik pengawasan yang dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi mendadak, on the spot observation, dan on the spot report.

- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan yang berbentuk lisan maupun tulisan.

Kegiatan pengawasan memerlukan menghasilkan informasi tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang terjadi. Informasi tersebut diperoleh dengan berbagai cara seperti laporan, hasil wawancara, penyebaran kuesioner dan pengamatan langsung oleh pengawas dilapangan. Informasi tersebut berguna untuk peningkatan kinerja seluruh komponen organisasi.

S.P Siagian (2003:137) mengatakan bahwa ciri-ciri pengawasan itu adalah :

- a. Pengawasan harus bersikap fact finding.
- b. Pengawasan harus bersifat prefectif.
- c. Pengawasan harus diarahkan kepada kegiatan yang sedang dilaksanakan.
- d. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk mengefisiensikan.
- e. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk administrasi dan manajemen.
- f. Pengawasan harus efisien.
- g. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi menentukan apa yang tidak betul.
- h. Pengawasan harus bersifat membimbing.

Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan untuk mencapai tujuan, suatu organisasi tidak bisa terlepas dari perencanaan dan pengawasan. Bagaimana perencanaan yang baik dan diiringi dengan pengawasan yang baik maka

pelaksanaan tugas akan dapat melakukan pekerjaan secara efektif. Dengan demikian barulah dapat terdapat kemungkinan kinerja yang diharapkan.

Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri dari tiga fese, hal ini digunakan oleh Manullang (2009 : 184) diantaranya sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :
 - a. Adanya pembagian tugas secara jelas
 - b. Adanya waktu pencapaian tujuan
 - c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan
2. Melakukan tindakan penilain atau evalusi, dapat dilakukan dengan cara seperti :
 - a. Laporan tertulis dari pada pegawai baik rutun maupun istimewa.
 - b. Melakukan kunjungan langsung.
 - c. Mengamati hasil kerja.
3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah :
 - a. Memberi teguran.
 - b. Memberikan peringatan
 - c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau keslaahan dalam mencari jalan keluar.

Faktor –faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan ialah sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia adalah seluruh potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik, sosial, ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dengan segala potensi yang dimilikinya meliputi kualitas dan kuantitas.

Dengan sub indikatornya :

1. Kualitas pelaksanaan pengawasan
 2. Jumlah pelaksanaan pengawasan
- b. Dana/biaya adalah sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan memberikan manfaat baik untuk sekarang maupun dimasa yang akan datang. Dengan sub indikatornya adalah biaya operasioanl dalam melakukan pengawasan
 - c. Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat berupa tempat, peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya. Dengan sub indikatornya adalah kendaraan operasional.

Syafri (2004:15) bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang baik itu meliputi

1. Expectation, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas.
2. Allocation, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Monitoring performance, yaitu mencatat dan memonitor hasil kegiatan.
4. Correction action, yaitu melukiskan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan.

2.3 Peraturan Pengawasan

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Pengawasan dilakukan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, yang meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi terdiri atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut azas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan.
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di desa yang terdiri atas pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.

Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi adalah :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya; dan

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.

Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan obyek pemeriksaan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka :

- a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*).
- b. Diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.

Menteri Sosial melakukan pengawasan teknis pelaksanaan pelayanan bidang sosial oleh Pemerintah Daerah sesuai SPM Bidang Sosial, dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat.

Pengawasan sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Teknis dilakukan :

- a. Menteri Sosial terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
- b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.4 Pemberdayaan Fakir Miskin

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus menerus atau juga disebut *kemiskinan struktural*. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai Fakir Miskin termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan

menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam dan bencana sosial.

Tujuan pemberdayaan fakir miskin antaranya adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga fakir miskin
2. Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga fakir miskin
3. Memberikan kemudahan akses modal usaha tanpa agunan bagi fakir miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro .
4. Meningkatkan aksesibilitas keluarga fakir miskin terhadap pelayanan sosial dasar.
5. Meningkatkan kondisi kualitas perumahan keluarga fakir miskin.
6. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan

Sasaran yang hendak dicapai dalam memberdayakan fakir miskin adalah:

1. Keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah hutan kemasyarakatan, perdesaan/ pertanian, sub urban, perkotaan, pesisir/pantai, kepulauan terpencil dan perbatasan antar Negara.
2. Keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam,

korban bencana sosial/ korban konflik sosial, terkena pemutusan hubungan kerja dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga.

Komponen Kegiatan dalam upaya memberdayakan fakir miskin diantaranya :

1. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
2. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)-KUBE Sejahtera, untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi KUBE fakir miskin.
3. Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin, untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin agar efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Dalam menunjang kegiatan dalam rangka mensejahterakan dan memberdayakan fakir miskin yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, maka dinas sosial memberikan bantuan berupa dana kepada kelompok usaha bersama yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibawah ini akan disajikan Nama Kelompok-Kelompok Usaha Bersama beserta besar bantuan dana yang diberikan.

Tabel 2.1
Nama Kelompok dan Besar Bantuan Dana Yang Diberikan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Kelompok	Jenis Usaha	Jumlah Dana
1	Anak Negeri Bertuah	Nelayan Dan Sagu	Rp. 18.500.000
2	Cahaya Rizki	Nelayan	Rp. 18.500.000
3	Harapan Jaya	Nelayan	Rp. 18.500.000
4	Karya Indah	Nelayan	Rp. 18.500.000
5	Karya Mandiri	Nelayan	Rp. 18.500.000
6	Nasib Bertuah	Nelayan	Rp. 18.500.000
7	Hasil Laut Sama Senang	Peerdagangan Penampungan Ikan Asin	Rp. 18.500.000
8	Karya Usaha	Pengencer BBM	Rp. 18.500.000
9	Mutiara Laut	Penampungan Udang Lopter	Rp. 18.500.000
10	Semangat Baru	Penampung Hasil Laut	Rp. 18.500.000

Sumber : Dinas Sosial Labupaten Indragiri Hilir Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya jumlah bantuan dana yang diberikan oleh dinas sosial dalam kelompok usaha bersama pembagiannya merata, yaitu sejumlah Rp. 18.500.000. dana tersebut merupakan dana bantuan yang bersumber dari APBN.

2.5 Dinas Sosial

Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, di bidang sosial serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah dalam rangka desentralisasi, dan dekonsentarsi serta tugas pembantuan.

Dinas sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial lingkup bantuan dan jaminan sosial, pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan kelembagaan dan penyuluhan,

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial lingkup bantuan dan jaminan sosial, pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, kelembagaan dan penyuluhan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial lingkup bantuan dan jaminan sosial, pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan kelembagaan dan penyuluhan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai fungsinya.

Selain fungsi diatas dinas sosial juga berfungsi sebagai pengawas dimana dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi jabatan struktural di lingkungan dinas daerah kabupaten indragiri hilir yang berupa melakukan pengawasan lingkup pemberdayaan sosial dan teknis fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana sosial, fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT), pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

Dalam pelaksanaan pengawasan pada kelompok usaha bersama, dinas sosial melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

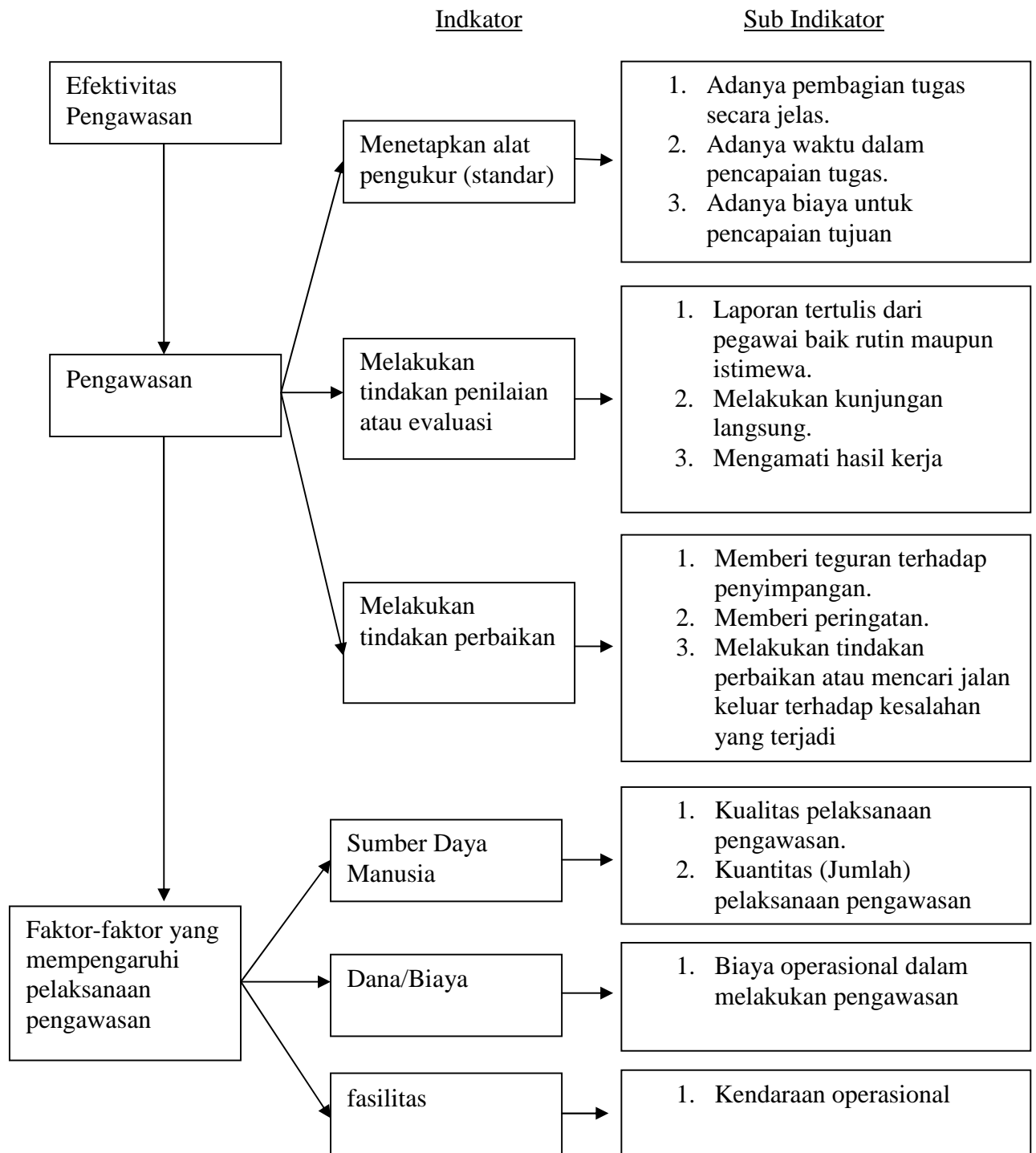
- 1. Meminta laporan tertulis secara berkala tentang kegiatan kelompok usaha bersama.
- 2. Melakukan kunjungan langsung pada kelompok usaha bersama.
- 3. Melakukan pengamatan tentang hasil kerja dari kelompok usaha bersama.
- 4. Mengevaluasi hasil kinerja kelompok usaha bersama.

2.6 Hipotesis

Suryabrata dalam Purwanto (2010:100) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, serta dihubngkan dengan teori-teori yang relevan, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut: *“Diduga Pengawasan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Indragiri Hilir belum efektif”*.

2.7 Kerangka Berfikir

Menurut Manulang (2009 : 184) Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkahnya sebagai berikut:



2.8 Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari salah pengertian serta pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini. maka pada penelitian ini penulis mengangkat pendapat pengawasan dari Manullang (2009: 184). Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri dari tiga fese, diantaranya sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :
 - a. Adanya pembagian tugas secara jelas.
 - b. Adanya waktu pencapaian tujuan.
 - c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan.
2. Melakukan tindakan penilain atau evalusi, dapat dilakukan dengan cara seperti :
 - c. laporan tertulis dari pada pegawai baik rutin maupun istimewa.
 - d. Melakukan kunjungan langsung.
 - e. mengamati hasil kerja.
3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah
 - a. Memberi teguran.
 - b. Memberikan peringatan
 - c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan ialah sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia adalah seluruh potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik, sosial, ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dengan segala potensi yang dimilikinya meliputi kualitas dan kuantitas.

Dengan sub indikatornya :

1. Kualitas pelaksanaan pengawasan
2. Jumlah pelaksanaan pengawasan

- b. Dana/biaya adalah sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan memberikan manfaat baik untuk sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Dengan sub indikatornya adalah biaya operasional dalam melakukan pengawasan.

- c. Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat berupa tempat, peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya.

Dengan sub indikatornya adalah kendaraan operasional.

2.9 Teknik Pengukuran

Untuk memudahkan menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variable atau indikator dalam tiga tingkatan atau variasi. Adapun penilaian tersebut adalah : Efektif, Cukup Efektif, dan Tidak Efektif

Adapun teknik pengukuran yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Efektif : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 67-100% terhadap masing-masing indikator penelitian.

Cukup Efektif : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 34-66% terhadap masing-masing indikator penelitian.

Tidak Efektif : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel rekapitulasi berisikan antara 0-33% terhadap masing-masing indikator penelitian.

1. Penerapan standar pelaksanaan mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai standar..

Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator adanya pembagian tugas secara jelas, adanya waktu pencapaian tujuan, dan adanya biaya

untuk pencapaian tujuan mendapat perolehan persentase antara 67-100% dalam tabel rekapitulasi.

Cukup Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator adanya pembagian tugas secara jelas, adanya waktu pencapaian tujuan, dan adanya biaya untuk pencapaian tujuan mendapat perolehan persentase antara 34-66% dalam tabel rekapitulasi.

Tidak Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator adanya pembagian tugas secara jelas, adanya waktu pencapaian tujuan, dan adanya biaya untuk pencapaian tujuan mendapat perolehan persentase antara 0-33% dalam tabel rekapitulasi.

2. Dalam pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama, penetapan alat ukur standar tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan melakukan tindakan penilaian atau evaluasi kegiatan pengawasan tersebut.

Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator laporan tertulis baik rutin maupun istimewa, melakukan kunjungan langsung, dan mengamati hasil kerja mendapat perolehan persentase antara 67-100% dalam tabel rekapitulasi.

Cukup Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator laporan tertulis baik rutin maupun istimewa, melakukan kunjungan langsung, dan

mengamati hasil kerja mendapat perolehan persentase antara 34-66% dalam tabel rekapitulasi.

Tidak Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator laporan tertulis baik rutin maupun istimewa, melakukan kunjungan langsung, dan mengamati hasil kerja mendapat perolehan persentase antara 0-33% dalam tabel rekapitulasi.

3. Melakukan tindakan perbaikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga perlu diadakannya perbaikan dalam pelaksanaan. Tindakan perbaikan ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan.

Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator memberi teguran dan peringatan, dan melakukan tindakan perbaikan mendapat perolehan persentase antara 67-100% dalam tabel rekapitulasi.

Cukup Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator memberi teguran dan peringatan, dan melakukan tindakan perbaikan mendapat perolehan persentase antara 34-66% dalam tabel rekapitulasi.

Tidak Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator memberi teguran dan peringatan,

dan melakukan tindakan perbaikan mendapat perolehan persentase antara 0-33% dalam tabel rekapitulasi.

4. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi proses pengawasan, yang merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan Kemudian.

Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator kualitas pelaksanaan pengawasan dan kuantitas (jumlah) pelaksanaan pengawasan mendapat perolehan persentase antara 67-100% dalam tabel rekapitulasi.

Cukup Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator kualitas pelaksanaan pengawasan dan kuantitas (jumlah) pelaksanaan pengawasan mendapat perolehan persentase antara 34-66% dalam tabel rekapitulasi.

Tidak Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator kualitas pelaksanaan pengawasan dan kuantitas (jumlah) pelaksanaan pengawasan mendapat perolehan persentase antara 0-33% dalam tabel rekapitulasi.

5. Dana ataupun biaya merupakan faktor penting dalam melakukan suatu pekerjaan seperti melakukan pengawasan, dana atau biaya sangat berperan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator biaya operasional mendapat perolehan persentase antara 67-100% dalam tabel rekapitulasi.

Cukup Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator biaya operasional mendapat perolehan persentase antara 34-66% dalam tabel rekapitulasi.

Tidak Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator biaya operasional mendapat perolehan persentase antara 0-33% dalam tabel rekapitulasi.

6. Demi tercapainya tujuan dari pengawasan efektif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama harus ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai. Dengan fasilitas-fasilitas penunjang dalam proses pengawasan maka akan menghasilkan pengawasan yang efektif dan efisien.

Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator kendaraan operasional mendapat

perolehan persentase antara 67-100% dalam tabel rekapitulasi.

Cukup Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator kendaraan operasional mendapat perolehan persentase antara 34-66% dalam tabel rekapitulasi.

Tidak Efektif : Jika rata-rata penilaian jawaban responden yang berisikan sub indikator kendaraan operasional mendapat perolehan persentase antara 0-33% dalam tabel rekapitulasi.

2.10 Variabel Penelitian

Manullang (2009 : 184) Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkahnya sebagai berikut:

Tabel 2.2. Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektifitas Pengawasan	1. Menetapkan alat ukur atau standar.	a. Adanya pembagian tugas secara jelas. b. Adanya waktu pencapaian tujuan. c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan.
	2. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi.	a. laporan tertulis dari pada pegawai baik rutin maupun istimewa. b. Melakukan kunjungan langsung. c. mengamati hasil kerja.
	3. Melakukan tindakan perbaikan	a. Memberi teguran. b. Memberikan peringatan c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan	1. Sumber Daya Manusia	a. Kualitas pelaksanaan pengawasan. b. Jumlah pelaksanaan pengawasan
	2. Dana/biaya	a. biaya operasional.
	3. Fasilitas	a. kendaraan operasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.

Penelitian ini penulis akan lakukan pada semester ganjil Tahun ajaran 2011 sampai selesai. Dimana Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Dinas Sosial Kabupaten Indragir Hilir Di Jalan Bunga Tembilahan.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data.

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Menurut Husein Umar (2004 :99) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.

b. Data sekunder.

Masih menurut Husein Umar (2004:99) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya Data yang berasal dari laporan-laporan maupun literature yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel.

Populasi adalah keseluruhan anggota atau objek-objek yang menjadi fokus penelitian. Menurut Nanang Martono (2010 : 66) Populasi adalah “keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti”. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan seluruh pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang keseluruhannya berjumlah 51 orang.

Sedangkan sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sample dapat didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Serta penulis menggunakan sample jenuh (Nanang Martono, 2010 : 70) merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dipilih sebagai sample, teknik ini disebut juga metode sensus . Apabila besarnya populasi kurang dari 100 untuk mendapatkan data yang refresentif maka seluruh populasi hendaknya di jadikan sample pada penelitian ini. Dan tujuan mengambil sample ialah memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan sebanyak mengamati sebagian saja dari populasi. Jadi dalam artian ini bahwa yang populasi yang ada dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Kemudian demi mendukung analisa data dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari beberapa orang masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (*Key informan*) untuk diwawancara dalam pengambilan data penelitian.

3.4 Metoda Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi.

Observasi adalah kegiatan peneliti yang langsung melakukan pengamatan kelapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun disini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk melihat keadaan secara nyata. Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan mengenai jenis-jenis usaha yang ada dalam kelompok usaha bersama, seperti; usaha dibidang perikanan, pertanian, perbengkelan, pertukangan, dan lain-lain. tujuannya adalah untuk mengetahui efektifitas pengawasan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama Di Tembilahn Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Wawancara (*nterview*),

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam wawancara penulis meminta informasi dari key

informan yang terdiri dari beberapa pegawai dinas sosial dan dari pihak pengusaha yang tergabung dalam kelompok usaha bersama.

c. Angket (kuesioner)

Quesioner adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebarakan kepada responden mengenai bagaimana Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pertanyaan kuesioner, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan indicator-indikator dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data.

Setelah penulis memperoleh data dari hasil obsevasi maupun kuesioner, untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu teknik analisa data dengan cara menggambarkan fenomena keadaan yang ditemui dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori. **(Hadi 2002 :137)**

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian dari Propinsi Riau terletak disebelah Tenggara, dengan luas wilayah mencapai $\pm 11.607,97 \text{ KM}^2$. Secara geografis wilayah ini terletak pada posisi $102^{\circ} 32' 59'' - 104^{\circ} 17' 13''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 32' 51''$ Lintang Utara – $1^{\circ} 07' 17''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dibatasi oleh :

- Kabupaten Pelalawan disebelah Utara
- Kabupaten Kepulauan Riau disebelah Timur
- Kabupaten Tanjung Jabung Propinsi Jambi disebelah Selatan
- Kabupaten Indragiri Hulu disebelah Barat.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian dibawah 500 meter diatas permukaan laut (dpl) atau daerah pesisir timur merupakan daerah rawa (gambut) yang beriklim tropis basah. Jumlah curah hujan rata – rata perbulan 156 mm dengan jumlah hari hujan 8 hari, terbesar terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Daerah ini keberadaannya dekat dengan khatulistiwa sehingga suhu udara relatif panas. Kondisi yang sedemikian itu mengakibatkan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah rawan bencana alam, kebakaran, disamping adanya faktor penyebab lain seperti prilaku masyarakat dan umumnya rumah penduduk terbuat dari kayu.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang banyak memiliki sungai, baik besar maupun kecil yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Sungai ini dapat berfungsi sebagai prasarana transportasi bagi masyarakat, disamping penyebab yang menjadikan daerah rawan bencana alam (longsor atau erosi pantai).

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

a. Kepala Dinas Sosial

1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional bidang sosial melaksanakan sebagai kewenangan, desentralisasi, dekonsetrasi serta tugas pembantu yang dilimpahkan oleh Bupati.
2. Kepala Dinas Sosial berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi :

- a. Memimpin, mengkoordinasi, mengusulkan kebijakan, mengambil keputusan, mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan bidang sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan. Melaksanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.

2. Sekretaris berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepala Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan umum dan kepegawaian.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol.
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas,
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
- g. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Dinas Sosial dan mengkoordinasinya dengan bagian hukum, organisasi, dan tatalaksana.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Susunan organisasi Sekretaris, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Bina Program.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

2. Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan tanggung jawab Sekretaris.

1. Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:
 - a. Melakukan identifikasi dan seleksi data..
 - b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data.
 - c. Menyusun rekapitulasi hasil-hasil kegiatan Dinas.
 - d. Memberikan informasi data penyadang masalah kesejahteraan sosial.
 - e. Mengkoordinasikan, melaksanakan sistem informasi kesejahteraan sosial.
 - f. Menyusun kriteria PMKS dan PSKS.
 - g. Melakukan penjenjangan, penelitian program/kegiatan bidang sosial.
 - h. Mempersiapkan, melakukan seleksi, verifikasi dan merumuskan.
 - i. Mengkoordinasikan dalam penyusunan rencana operasional kegiatan
 - j. Menyusun profil Dinas.
 - k. Menyusun presentase Dinas.
 - l. Melaksanakan kerja sama bidang sosial.
 - m. Monitoring program/kegiatan bidang sosial.
 - n. Mempersiapkan instrument dan petugas monitoring dan evaluasi.
 - o. Melaksanakan dokumentasi dan arsip perencanaan.

- p. Membuat laporan pelaksanaan progran/kegiatan baik semester maupun tahunan.
 - q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Kepala Sub Bgian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, pengadaan naskah-naskah Dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas.
 - b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan.
 - c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat.
 - d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, urusan pensiun, pangakt, DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhetian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian, dan disiplin pegawai.
 - e. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, dan fungsi umum dan tata usaha kepegawaian lainnya.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
3. Kepala Sub Bagian Keungan dan perlengkapan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
- b. Menyusun rencana pendapatan dan belanja Dinas.
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan dan menyusun laporan akuntansi.
- d. Mengkoordinasikan pembayaran dan pencairan uang perjalanan dinas.
- e. Menyusun, mengelola Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan
- f. Mengkoordinir, memberikan petunjuk pelaksanaan keuangan bendahara.
- g. Melaksanakan tugas bendahara dan pembantu bendahara,
- h. Mengurus segala keperluan/perlengkapan.
- i. Melaksanakan identifikasi dan seleksi barang/kendaraan Dinas.
- j. Melaksanakan penghapusan, pengadaan barang, dan kendaraan Dinas.
- k. Melaksanakan pengadaan alat tulis kantor Dinas.
- l. Melaksanakan pemeliharaan, serta rencana kebutuhan sarana dan prasarana Dinas.

c. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial

- 1. Kepala bidang bantuan dan jaminan sosial mempunyai tugas pengelolaan bantuan dan jaminan sosial

2. Kepala bidang bantuan dan jaminan sosial berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi.
- b. Melaksanakan pembinaan.
- c. Melaksanakan pengendalian.
- d. Melaksanakan fasilitasi serta penyediaan dan prasarana usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan orang terlantar serta usaha pengumpulan / pengelolaan sumber-sumber dana sosial dan jaminan sosial.
- e. Melaksanakan bimibingan teknis, bimbingan sosial dan pengendalian terhadap urusan bantuan dan jaminan sosial.
- f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Bidang bantuan dan jaminan sosial terdiri dari :

- a. Seksi bantuan social
- b. Seksi pelayanan sosial korban kekerasan dan orang terlantar.
- c. Seksi pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.

2. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

1. Kepala seksi bantuan sosial mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan, menyeleksi, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi, dan relokasi sosial bagi korban bencana.
 - b. Menyusun jadwal piket dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya bencana.
 - c. Menyusun rekapitulasi kondisi, jumlah korban, tenaga pelaksana dan sarana dan prasarana dalam penanganan bencana.
 - d. Mengusulkan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, menyediakan sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
 - f. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala bidang.
2. Kepala seksi pelayanan sosial korban kekerasan dan orang terlantar mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pelayanan, bantuan sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana bagi pekerja migran bermasalah.

- b. Melaksanakan pelayanan, bantuan sosial dan pemulangan orang terlantar.
 - c. Melaksanakan konsultasi, resosialisasi, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta rujukan bagi korban tindak kekerasan.
 - d. Menyusun rekapitulasi hasil pelayanan bagi korban tindak kekerasan, pekerja migran dan orang terlantar.
 - e. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala bidang.
3. Kepala seksi pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan instrumen, verifikasi, pengumpulan sumber dana sosial dan jaminan sosial.
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis, perizinan dan memonitor terhadap pelaksanaan pengumpulan sumber dana sosial dan jaminan sosial.
 - c. Melaksanakan pembinaan kegiatan jaminan sosial.
 - d. Melaksanakan pengawasan dan penertiban pengumpulan dana sosial dan jaminan sosial.
 - e. Melaksanakan rekomendasi, perizinan dan pengawasan undian berhadiah.

- f. Menyusun rekapitulasi hasil kegiatan pengumpulan dana sosial, jaminan sosial dan undian.
- g. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan.

d. Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

1. Kepala bidang pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan / pekerjaan dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana bagi anak dan lanjut usia, penyandang cacat, taruma sosial, tuna sosial Eks korban Narkotika dan psikotropika dan Zat Adiktif serta HIV/AIDS.
2. Kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan sosial.
- b. Melaksanakan rehabilitasi sosial.
- c. Melaksanakan fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana bagi anak korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif serta HIV / AIDS.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas.

1. Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial terdiri dari :

- a. Seksi pelayanan anak dan lanjut usia.
- b. Seksi rehabilitasi tuna sosial, Eks KorbanNarza dan HIV / AIDS.

- c. Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
2. Masing-masing seksi di pimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan tanggung jawab kepala bidang.
 1. Kepala seksi pelayanan anak dan lanjut usia mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan.
 - b. Melaksanakan pelayanan, rehabilitasi, perlindungan sosial dan fasilitasi bagi anak.
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial bagi lanjut usia.
 - d. Menyusun rekapitulasi hasil program / kegiatan pelayanan anak dan lanjut usia.
 - e. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.
 2. Kepala seksi rehabilitasi tuna sosial, Eks Korban Nafza dan HIV/AIDS mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan, rehabilitasi sosial, konsultasi sosial, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta resosialisasi bagi penyandang masalah tuna sosial.

- b. Melaksanakan pelayanan, rehabilitasi sosial, menkonsultasi sosial, fasilitasi, peyediaan sarana dan prasarana serta resosialisasi bagi korban narkoba dan zat adiktif serta HIV/AIDS.
 - c. Menyusun rekapitulasi hasil pelayanan terhadap tuna sosial Eks korban.
 - d. Melaksanakan tata kearsipan pelayanan dan dokumentasi kegiatan.
 - e. Melaksanakan rujukan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
3. Kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan, konsultasi sosial, perlindungan sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat.
 - b. Melaksanakan pelayanan, rehabilitasi sosial, konsultasi sosial perlindungan sosial.
 - c. Menyusun rekapitulasi hasil pelayanan penyandang cacat dan taruma.
 - d. Menyusun standarisasi pelayanan penyandang cacat dan taruma.

- e. Melaksanakan tata kearsiapan pelayanan dan dokumentasi kegiatan.
- f. Melaksanakan rujukan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Kepala bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan / pekerjaan fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana sosial, bimbingan teknis, pembinaan, melaksanakan kemitraan, pengawasan dan evaluasi, pemberdayaan sosial terhadap kegiatan kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, kegiatan sosial yang ada di masyarakat, fakir miskin dan komunitas adat terpencil.
2. Kepala bidang pemberdayaan sosial berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melakasnakan tugas kepala bidang pemberdayaan sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, penyediaan data dan informasi, serta pelaporan.
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasaran terhadap kegiatan kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, kegiatan sosial yang ada di masyarakat.
- c. Melaksanakan pemberdayaan fakir miskin dan keluarga.

- d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepahlawanan kejuangan, keprintisan, kesetiakawana sosial yang ada di masyarakat, fakir miskin, dan komunitas adat terpencil.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas.
 - 1. Bidang pemberdayaan sosial terdiri dari :
 - a. Seksi pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
 - b. Seksi pemberdayaan sosial masyarakat.
 - c. Seksi pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil.
 - 2. Masing-masing seksi di pimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan tanggung jawab kepala bidang.
 - 1. Kepala seksi pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana pekerjaan, kegiatan dan sosialisasi terhadap pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan kesetiakawanan sosial nasional.
 - b. Melaksanakan penyediaan dukungan / bantuan, fasilitasi dan santunan terhadap keluarga pahlawan.
 - c. Melaksanakan rekapitulasi hasil program / kegiatan.
 - d. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan.
 - e. Mempersiapkan bahan-bahan dan dukungan pelaksanaan hari besar kenegaraan.

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
2. Kepala seksi pemberdayaan sosial masyarakat mempunyai tugas :
- a. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan sosial dan tata teknis terhadap lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensi (keluarga).
 - b. Pelaksanaan sosialisasi kelembagaan nilai-nilai keluarga.
 - c. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasaran bagi keluarga bermasalah sosial ekonomi.
 - d. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
3. Kepala seksi pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan pemberdayaan komunitas adat terpencil.
 - b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana bagi KAT.
 - c. Menyusun rekapitulasi hasil pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan KAT

f. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Sosial

1. Kepala bidang kelembagaan dan penyuluhan sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis, bimbingan sosial, urusan/kegiatan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana kegiatan karang taruna, organisasi sosial dan wahana pembinaan, kerja sama/kemitraan, pengawasan dan pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dan profesional dan panti-panti sosial serta penyuluhan sosial.
2. Kepala bidang kelembagaan dan penyuluhan sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas kepala bidang kelembagaan dan penyuluhan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis, bimbingan sosial.
- b. Melaksanakan urusan/kegiatan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana kegiatan karang taruna, organisasi sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
- c. Melaksanakan pembinaan, kerjasama/kemitraan, pengawasan dan pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dan profesional, organisasi sosial dan panti-panti sosial.
- d. Melaksanakan penyuluhan sosial.

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
 - 1. Bidang kelembagaan dan penyuluhan sosial terdiri dari :
 - a. Seksi organisasi sosial.
 - b. Seksi pekerja sosial dan dunia usaha.
 - c. Seksi penyuluhan sosial.
 - 2. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
 - 1. Kepala seksi organisasi sosial mempunyai tugas.
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan.
 - c. Melaksanakan bimbingan sosial, fasilitasi, penyediaan sarana.
 - d. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang
 - 2. Kepala seksi pekerja sosial dan dunia usaha mempunyai tugas.
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
 - b. Melaksanakan pembentukan jejaring sosial dan pembinaan terhadap usaha-usaha pemberdayaan dunia usaha dan mitra kerja lainnya.

- c. Bimbingan sosial, teknis, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana terhadap operasional, pembinaan pekerja sosial dan masyarakat.
 - d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana PSKS lainnya.
 - e. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
3. Kepala seksi penyaluran sosial mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pelaksanaan penyaluran sosial.
 - b. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyaluran sosial.
 - c. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

4.3 Visi dan Misi Dinas Sosial

a. Visi.

Visi merupakan hal utama yang harus didefinisikan sebelum suatu organisasi dapat menjalankan usahanya, kemudian Visi ini juga harus dijabarkan secara luas dan dapat didefinisikan.

Dalam mendukung Visi Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Perangkat Daerah menetapkan Visi yang

berkaitan dengan pelayanan dan penanganan bidang Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :

“ Terwujudnya Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Pelaksana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang berdasarkan Kesadaran, Kesetiakawanan, Tanggungjawab dan Partisipasi Sosial pada Tahun 2025 “

b. Misi.

Misi adalah beban yang harus dibawa karena adanya obsesi dari Visi tersebut. Untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, maka Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup PMKS melalui program pemberdayaan sosial.
- b. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS.
- c. Meningkatkan kesadaran hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang harmonis melalui nilai-nilai kelembagaan dan penyuluhan sosial.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pegawai, perencanaan, serta kerjasama program bidang sosial.
- e. Mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial melalui bantuan dan jaminan sosial.
- f. Meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui panti.

Berdasarkan hasil interaksi faktor – faktor lingkungan strategis, maka keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial akan ditentukan oleh faktor – faktor keberhasilan, yaitu :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia secara Proporsional dan Profesional.
- b. Tersedianya data / informasi yang memadai dalam upaya pelayanan dan penanganan.
- c. Adanya kerjasama antar institusi yang bergerak diberbagai Bidang yang mendukung Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.
- d. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai.

4.4 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kab. Inhil

Struktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggungjawab dari setiap yang ada dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

Struktur organisasi pada Dinas Sosial Kab Inhil akan memudahkan bagi pegawai/staf dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya masing-masing, serta kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Selain itu melalui garis struktur organisasi yang mana tugas dan wewenang serta tanggungjawab telah tergambar dan dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan akan mampu beralasan dengan baik sesuai dengan arahan-arahan maupun sasaran dari organisasi,

sehingga semuanya menjadi jelas dan dapat berjalan dengan baik karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam mencapai tujuan tersebut.

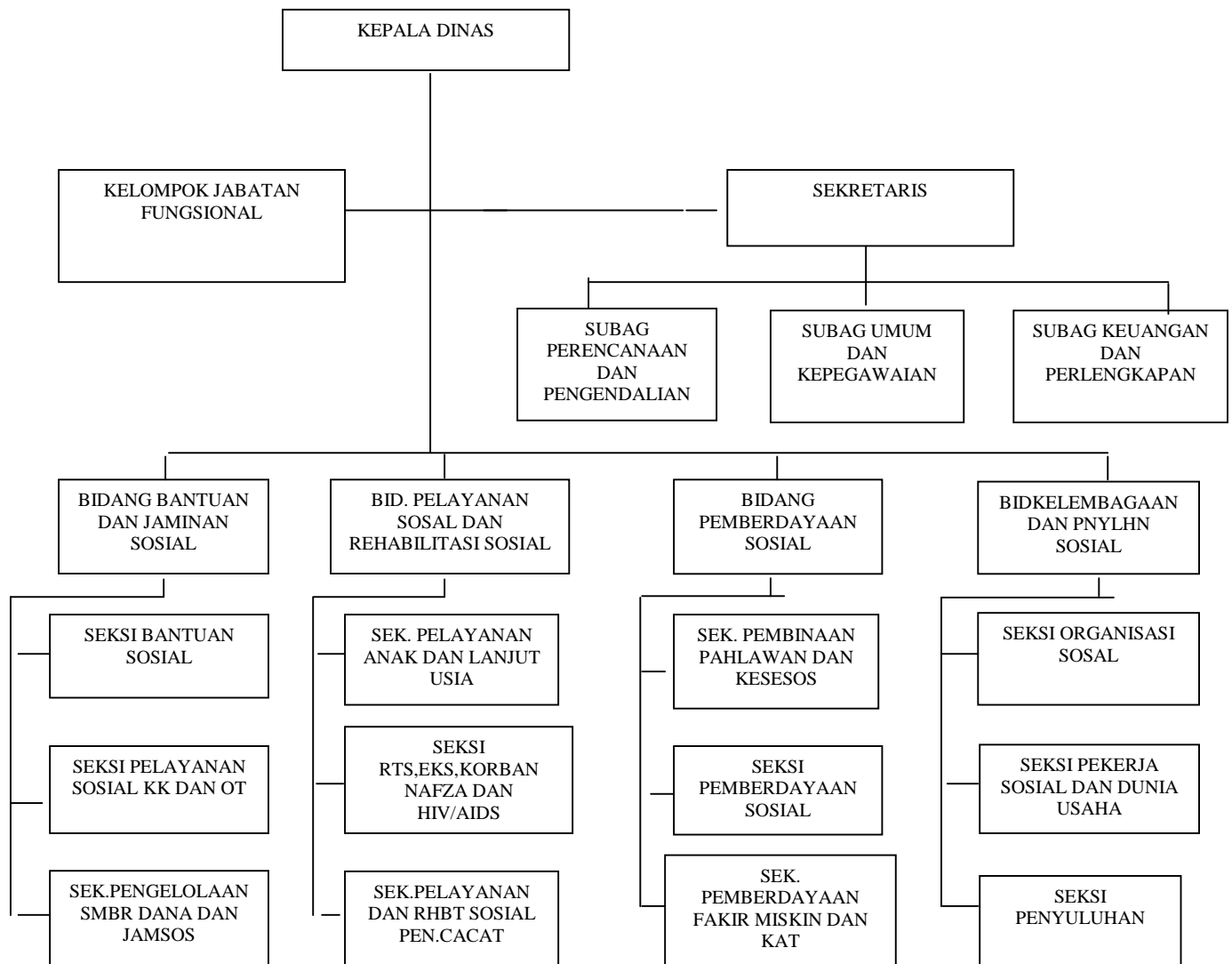
Organisasi selalu memiliki bagian strktur organisasi yang dapat dikatakan sebagai suatu garis koordinasi yang menggambarkan secara sistematis bagaimana hubungan kerja dari setiap orang yang ada didalam suatu organisasi tersebut. jadi suatu organisasi akan selalu terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pimpinan.
2. Adanya sekelompok manusia yang dipimpin.
3. Adanya kerjasama.
4. Adanya tujuan

Dari beberapa unsur tersebut diatas ternyata unsur pemimpin mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam suatu organisasi yang juga sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kelancaran jalannya kegiatan-kegiatan organisasi dan seluruh aktifitas yang ada didalam Dinsos Kab Inhil yang di Pimpinnya. Seorang pemimpin harus dapat dan mampu menciptakan suatu keadaan dimana bawahannya merasa ikut memiliki instansi/organisasi yang mereka pimpin dan merasa aman serta senang hati dalam bekerjasama untuk tercapainya tujuan dari Dinsos.

Bagi suatu instansi pemerintah yang menginginkan agar tujuannya tercapai. Disamping melaksanakan aktifitasnya dengan baik dan memperhatikan semua kebutuhan yang diperlukan instansi tersebut juga semestinya memiliki

sebuah strktur organisasi yang ada pada dasarnya akan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi yang bersangkutan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Identitas responden dari penelitian Analisis Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir) yang berjumlah 51 Orang Responden. dan selanjutnya penulis klasifikasikan berdasarkan tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama bertugas dan jabatan. Untuk melihat kategori responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

a. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini merupakan data responden yang ditinjau dari jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Data ini di buat untuk melihat perbandingan antara jumlah responden laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	33	64, 7%
2	Perempuan	18	35,3%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Inhil 2012

Dari tabel.5.1 di atas terlihat jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa pegawai laki-laki berjumlah 33 orang (64,7%), sedangkan yang perempuan berjumlah 18 orang (35,3%). Dengan

demikian terlihat bahwa pegawai pada Dinas Sosial lebih banyak pegawai laki-laki dibanding pegawai perempuan.

b. Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Dalam meningkatkan Pengawasan yang baik, umur mempengaruhi untuk melaksanakan pengawasan. Untuk mengetahui tingkat umur pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, penulis akan menyajikan mengenai identitas responden berdasarkan kelompok umur pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2
Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	20-25	9	17,7%
2	26-30	7	13,7%
3	31-35	4	7,8%
4	36-40	5	9,8%
5	41-45	7	13,7%
6	46-50	13	25,5%
7	Diatas 50	6	11,8%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber Data : Data Olahan Lapangan 2012

Dengan melihat tabel 5.2. diatas maka dapat diketahui umur pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sangat bervariasi yaitu umur diantara 20-25 tahun sebanyak 9 orang (17,7%), umur 26-30 sebanyak 7 orang (13,7%), umur 31-35 sebanyak 4 orang (7,8%), umur 36-40 sebanyak 5 orang (9,8%), umur 41-45 sebanyak 7 orang (13,7%), umur 46-50 sebanyak 13 orang (25,5%) dan diatas umur 50 sebanyak 6 orang (11,8). Jadi umur pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir yang paling dominan umur 46-50 tahun.

c. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan, karena dengan pendidikanlah sumber daya manusianya akan berkualitas. Untuk mengetahui gambaran dan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3
Identitas Respdnen Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SLTA	25	49,02%
2	D.II	-	-
3	D.III	3	5,88%
4	S.1	21	41,18%
5	S.2	2	3,92%
	Jumlah	51	100%

Sumber Data :Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.3. tersebut jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 51 orang dan dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pemerintah bervariasi. Tingkat Pendidikan SLTA berjumlah 25 orang atau 49,02%, tamat DIII berjumlah 3 orang (5,88%), tamat S1 Berjumlah 21 Orang atau 41,1% sedangkan S2 berjumlah 2 Orang atau 3,92%. Tingkat pendidikan yang paling dominan adalah SLTA yang berjumlah 25 orang (49,02%).

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa secara umum tingkat pendidikan responden sudah dapat dikatakan baik karena mayoritas. Karena variasi tingkat pendidikan responden sudah cukup baik yang mana mencakup seluruh tingkat pendidikan yakni mulai dari tingkat, SLTA dan ada juga yang Samapai dengan tingkat S2.

d. Identitas Responden Berdasarkan Pangkat atau Golongan

Pangkat atau Golongan dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi kelancaran dan majunya organisasi. disamping itu, jabatan yang dimiliki oleh pegawai dapat menunjang tingginya untuk melakukan pengawasan. Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jabatan di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir penulis akan menyajikan mengenai identitas responden berdasarkan jabatan yang dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 5.4
Identitas Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Frekuensi	Persentase
1	Golongan Iic	4	7,84%
2	Golongan Iib	2	3,94%
3	Golongan IId	1	1,96%
4	Golongan IIIa	7	13,73%
5	Golongan IIIb	5	9,80%
6	Golongan IIId	10	19,60%
7	Golongan Ivb	5	9,80%
8	Honorer	17	33,33%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber Data : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.4. diatas dapat disimpulkan bahwa pangkat atau golongan tergolong cukup baik, karena semakin tinggi pangkat atau golongan seseorang, maka semakin banyak pengalaman kerja yang telah diperoleh. Hal ini dapat dilihat golongan atau pangkat yang paling dominan adalah golongan III yang berjumlah 22 orang. Ini menunjukkan golongan pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam kategori cukup baik. Namun jika kita lihat dalam tabel diatas masih ada tenaga honorer yang berjumlah 17 orang.

e. Identitas Responden Berdasarkan Lama Bertugas

Masa kerja atau lama bertugas responden merupakan pengalaman pegawai dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan selama bekerja di instansi tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai lama Bertugas responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5
Identitas Responden Berdasarkan Lama Bertugas

No	Lama Bertugas	Frekuensi	Persentas
1	1-10 Tahun	21	41,18%
2	11-20 Tahun	16	31,37%
3	21 Tahun Ke Atas	14	27,45%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber Data : Data Olahan Lapangan 2012

Dengan dilihat Tabel 5.5. diatas maka dapat diketahui bahwa mayoritas pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan pekerjaannya selama 1-10 tahun sebanyak 21 orang (41,18 %), 11-20 tahun sebanyak 16 orang (31,37%) sedangkan 21 tahun keatas sebanyak 14 orang (27,45%) pegawai yang telah mengabdikan di instansi tersebut. Jadi yang paling dominan pegawai melakukan pekerjaannya selama 1-10 tahun yaitu sebanyak 21 orang (41,18%).

5.2. Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari berbagai pengertian tentang pengawasan, yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui dengan jelas bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan

dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Suatu organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, sebab pengawasan berupaya membetulkan kesalahan-kesalahan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam organisasi. Pengawasan men-cek apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan arah tujuan yang sudah ditetapkan, pengawasan meliputi aspek penelitian apakah hasil yang telah dicapai telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta pengawasan berguna untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan.

Dalam tabel penelitian membahas seluruh tanggapan 51 responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjawab pertanyaan yang berupa kuesioner yang peneliti laksanakan di Dinas Sosial Kab. Inhil. Sebelum peneliti membuat daftar pertanyaan beserta alternative jawaban yang diberikan kepada responden dan kemudian responden menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu peneliti melakukan observasi sebagai alat pemantau atau turun lapangan terhadap kuesioner, sehingga diharapkan dari responden tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya.

Untuk penulisan ini, adapun fokus penelitian ini adalah efektivitas pengawasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan. Adapun indikator efektifitas pengawasan adalah:

- a. Menetapkan alat ukur (standar)
- b. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi
- c. Melakukan tindakan perbaikan

a. Menetapkan Alat Ukur (Standar)

Penerapan standar pelaksanaan mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai standar. Dengan adanya alat ukur atau standar dalam melakukan pengawasan, maka akan mempermudah dalam proses pelaksanaan pengawasan tersebut, sehingga efektifitas pengawasan dapat tercapai dengan maksimal.

Kemudian, dibawah ini akan disajikan hasil penelitian penulis mengenai penetapan alat ukur atau standar pengawasan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir. Penetapan alat ukur atau standar bertujuan untuk mencapai efektifitas Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun indikator-indikator dari menetapkan alat ukur atau standar pengawasan yaitu:

1. Adanya Pembagian Tugas Secara Jelas

Untuk mengetahui Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam menetapkan adanya pembagian tugas secara jelas dalam

melakukan pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.6
Tanggapan Responden Mengenai Pembagian Tugas Secara Jelas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	21	41,2%
2	Cukup Efektif	27	52,9%
3	Tidak Efektif	3	5,9%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.6 diatas, tanggapan responden terhadap pembagian tugas secara jelas yang dilakukan oleh dinas sosial kab. Inhil dapat di kategorikan “Cukup Efektif” yaitu 27 orang (52,9%) dari total responden. Kemudian 21 orang (41,2%) menyatakan Efektif, sedangkan sebanyak 3 orang (5,9%) responden merasa tidak Efektif dalam pembagian tugas secara jelas dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama.

Jadi, berdasarkan tabel 5.6 diatas, dapat dinyatakan bahwa dalam menetapkan alat ukur atau standar pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sudah membuat pembagian tugas secara jelas dan termasuk dalam kategori Cukup Efektif.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang mutu pengawasan Dinas Sosial terhadap Kelompok Usaha Bersama setelah adanya pembagian tugas secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.7
Tanggapan Responden mengenai Mutu Pengawasan setelah adanya
Pembagian Tugas Secara Jelas oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	20	39,2%
2	Cukup Efektif	28	54,9%
3	Tidak Efektif	3	5,9%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari table 5.7 di atas terlihat tanggapan responden tentang mutu pengawasan dapat dikategorikan “Cukup Efektif “ yaitu 28 orang (54,9%). Kemudian jumlah frekuensi responden yang terendah adalah Tidak Efektif sebanyak 3 orang (5,9%),

Dari tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa dengan adanya pembagian tugas secara jelas dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Inhil terhadap kelompok usaha bersama akan berkorelasi dengan mutu pengawasan itu sendiri, artinya, apabila ada pembagian tugas secara jelas dalam pengawasan maka efektifitas pengawasan akan dapat tercapai. Dan berdasarkan hasil penelitian, pembagian tugas secara jelas dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Inhil terhadap kelompok usaha bersama dapat dikategorikan cukup Efektif.

2. Adanya Waktu Pencapaian Tujuan.

Dengan adanya penetapan waktu pencapaian tujuan, maka akan mempermudah Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai target pengawasan berdasarkan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

dalam menetapkan adanya waktu pencapaian tujuan dalam melakukan pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.8
Tanggapan Responden mengenai Adanya Waktu Pencapaian Tujuan
Yang di Tetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	19	37,3%
2	Cukup Efektif	28	54,9%
3	Tidak Efektif	4	7,8%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.8 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana Dinas Sosial Kab. Inhil menetapkan adanya waktu pencapaian tujuan dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, responden yang menjawab Efektif berjumlah 19 orang atau 37,3 %. yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 28 orang atau 54,9 %, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 4 orang atau 7,8 %.

Berdasarkan tabel 5.8 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil Cukup Efektif dalam menetapkan waktu pencapaian tujuan dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama.

Setelah waktu pencapaian tujuan ditentukan, maka kita bisa melihat bagaimana mutu pengawasannya, artinya hasil antara pengawasan yang didukung oleh standar waktu pencapaian tujuan, tentu akan berbeda dengan hasil pengawasan tanpa disertai adanya standar waktu pencapaian pengawasan tersebut. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang

mutu pengawasan Dinas Sosial terhadap Kelompok Usaha Bersama setelah adanya waktu pencapaian tujuan dari pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.9
Tanggapan Responden mengenai Mutu Pengawasan setelah
ditetapkannya Waktu Pencapaian Tujuan oleh Dinas Sosial
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	28	54,9%
2	Cukup Efektif	21	41,2%
3	Tidak Efektif	2	3,9%
	Jumlah	51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.9 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai mutu pengawasan Dinas Sosial kab. Inhil, pada kelompok usaha bersama yang menjawab Efektif berjumlah 28 orang atau 54,9 %, yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 21 orang atau 41,2 %, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 2 orang atau 3,9%

Berdasarkan tabel 5.9 diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban Baik, artinya bahwa Dinas Sosial dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama dalam penetapan waktu pencapaian tujuan tergolong Efektif.

3. Adanya Biaya Untuk Pencapaian Tujuan

Setelah standar waktu pencapaian tujuan pengawasan ditetapkan, maka harus didukung oleh biaya-biaya dalam proses pencapaian tujuan pengawasan tersebut. Artinya, pencapaian tujuan pengawasan tidak akan tercapai dengan maksimal tanpa didukung oleh biaya dalam proses pengawasan. Untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kabupaten

Indragiri Hilir dalam menetapkan adanya Biaya untuk pencapaian tujuan dalam melakukan pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5.10
Tanggapan Responden Mengenai Adanya Biaya untuk Pencapaian Tujuan Pengawasan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	12	23,6%
2	Cukup Efektif	30	58,8%
3	Tidak Efektif	9	17,6%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.10 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana Dinas Sosial Kab. Inhil menetapkan adanya Biaya untuk pencapaian tujuan dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, responden yang menjawab Efektif berjumlah 12 orang atau 23,6 % yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 30 orang atau 58,8 %, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 9 orang atau 17,6 %.

Berdasarkan tabel 5.10 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil Cukup Efektif dalam melakukan pengawasan setelah adanya biaya untuk pencapaian tujuan dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang mutu pengawasan Dinas Sosial terhadap Kelompok Usaha Bersama setelah adanya waktu pencapaian tujuan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.11
Tanggapan Responden mengenai Mutu Pengawasan setelah Adanya
Biaya untuk Pencapaian Tujuan Pengawasan oleh Dinas Sosial
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	18	35,3%
2	Cukup Efektif	28	54,9%
3	Tidak Efektif	5	9,8%
	Jumlah	51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.11 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana mutu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil setelah adanya Biaya untuk pencapaian tujuan dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, responden yang menjawab Efektif berjumlah 18 orang atau 35,3% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 28 orang atau 54,9%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 5 orang atau 9,8 %.

Berdasarkan tabel 5.11 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil Cukup Efektif dalam mutu pengawasan setelah adanya Biaya untuk pencapaian tujuan dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama.

Kemudian, untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator variabel menetapkan alat ukur atau standar pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menetapkan
Alat Ukur (Standar) Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial
Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama

No	Indikator Pengukuran	Klasifikasi Tanggapan Responden			
		E	CE	TE	Jumlah
1	Adanya Pembagian Tugas Secara Jelas	21 (41,2%)	27 (52,9%)	3 (5,9%)	51
2	Mutu Pengawasan Setelah Adanya Pembagian Tugas Secara Jelas	20 (39,2%)	28 (54,9%)	3 (5,9%)	51
3	Adanya Waktu Pencapaian Tujuan	19 (37,3%)	28 (54,9%)	4 (7,8%)	51
4	Mutu Pengawasan setelah ditetapkannya Waktu Pencapaian Tujuan	28 (54,9%)	21 (41,2%)	2 (3,9%)	51
5	Adanya Biaya untuk Pencapaian Tujuan	12 (23,6%)	30 (58,8%)	9 (17,6%)	51
6	Mutu Pengawasan setelah Adanya Biaya untuk Pencapaian Tujuan	18 (35,3%)	28 (54,9%)	5 (9,8%)	51
Jumlah		118	162	26	306
Rata-Rata		19,7	27	4,3	51
Persentase		38,7%	52,9%	8,4%	100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator Menetapkan Alat Ukur atau Standar dalam Pengawasan Terhadap Kelompok Usaha Bersama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir yang penulis ajukan kepada

responden termasuk dalam kategori Cukup Efektif, yaitu rata-rata jawaban responden sebanyak 27 dengan persentase 52,9% dari total 51 responden.

b. Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi

Dalam pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama, penetapan alat ukur standar tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan melakukan tindakan penilaian atau evaluasi kegiatan pengawasan tersebut. Oleh karena itu langkah kedua guna mencapai efektifitas dalam pengawasan adalah melakukan tindakan penilaian atau evaluasi. Dengan adanya tindakan penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir kita dapat melihat sejauh mana pengawasan dapat membentuk kelompok usaha bersama kearah yang lebih baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana.

Kemudian, dibawah ini akan disajikan hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Indragiri Hilir. berdasarkan indikatornya yaitu:

1. Laporan Tertulis Baik Rutin Maupun Istimewa

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam membuat laporan tertulis baik rutin maupun istimewa dalam melakukan pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.13
Tanggapan Responden Mengenai Laporan Tertulis Dalam
Pengawasan yang Dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	32	62,8%
2	Cukup Efektif	15	29,4%
3	Tidak Efektif	4	7,8%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.13 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana Dinas Sosial Kab. Inhil dalam membuat laporan tertulis baik rutin maupun istimewa dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, responden yang menjawab Efektif berjumlah 32 orang atau 62,8 % yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 15 orang atau 29,4%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 4 orang atau 7,8%.

Berdasarkan tabel 5.13 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil Efektif dalam membuat laporan tertulis baik rutin maupun istimewa dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang mutu pengawasan Dinas Sosial terhadap Kelompk Usaha Bersama setelah adanya laporan tertulis baik rutin maupun istimewa dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.14
Tanggapan Responden mengenai Mutu Pengawasan Setelah Adanya
Laporan Tertulis yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	36	70,6%
2	Cukup Efektif	14	27,5%
3	Tidak Efektif	1	1,9%
	Jumlah	51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.14 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai bagaimana mutu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil setelah adanya laporan tertulis baik rutin maupun istimewa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, responden yang menjawab Efektif berjumlah 36 orang atau 70,6 % yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 14 orang atau 27,5 %, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 1 orang atau 1,9 %.

Berdasarkan tabel 5.14 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil Baik dalam mutu pengawasan setelah adanya laporan tertulis baik rutin maupun istimewa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama.

2. Melakukan Kunjungan Langsung

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan kunjungan langsung terhadap kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.15
Tanggapan Responden Mengenai Kunjungan Langsung yang
Dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	18	35,3%
2	Cukup Efektif	31	60,8%
3	Tidak Efektif	2	3,9%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.15 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana Dinas Sosial Kab. Inhil dalam melakukan kunjungan langsung terhadap kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan, responden yang menjawab Efektif berjumlah 18 orang atau 35,3% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 31 orang atau 60,8%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 2 orang atau 3,9 %.

Berdasarkan tabel 5.15 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil Cukup Efektif dalam melakukan kunjungan langsung terhadap kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan.

Namun, berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, penulis melihat ada indikasi bahwa kunjungan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri hilir dalam rangka pengawasan pada Kelompok Usaha Bersama masih belum maksimal. Artinya dalam hal kunjungan pada kelompok usaha bersama tidak sampai pada objek yang diawasi. Hal ini dibenarkan oleh pendapat salah seorang masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama yaitu bapak Zulkifli Mansur, dalam wawancara dengan penulis beliau mengatakan:

“Kunjungan langsung yang dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial dalam rangka pengawasan pada kelompok usaha bersama bisa dikatakan minim. Selama saya bergabung dalam kelompok ini hanya beberapa kali mendapat kunjungan langsung dari pegawai Dinas Sosial, saya mempunyai pendapat bahwa dalam melakukan kunjungan, pihak Dinas Sosial hanya menemui pengurus–pengurus inti dalam kelompok usaha bersama ini, seperti Ketuanya, Sekretaris, maupun Bendahara kelompok usaha bersama tingkat kecamatan.” (**wawancara 2012**)

Dari perbedaan hasil pembahasan data kuesioner dan wawancara yang penulis dapatkan, disini penulis menganalisa bahwa ada indikasi kendala kendala yang dihadapi oleh pegawai dinas sosial dalam rangka pengawasan pada kelompok usaha bersama, sehingga kunjungan langsung yang seharusnya sampai pada objek yang diawasi pada kenyataanya hanya sampai pada tingkat pengurus inti dari kelompok usaha bersama, hal ini tentu menjadi problema baik dari pihak dinas sosial maupun anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha bersama. Sehingga ketika salah satu usaha mengalami masalah, pihak dinas sosial tidak bisa bertindak cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi karna kurangnya informasi langsung dari kelompok usaha bersama tersebut.

Selain itu, tidak maksimalnya kunjungan langsung yang dilakukan oleh dinas sosial dalam pengawasan pada kelompok usaha bersama juga menimbulkan beberapa masalah yang dialami oleh kelompok usaha bersama, salah satu permasalahan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu kelompok usaha bersama adalah gejala pemotongan dana oleh pendamping KUBE, yaitu sebesar 25%. Sehingga dengan adanya pemotongan tersebut mengganggu kinerja usaha yang dilakukan masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha bersama.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan salah satu ketua KUBE yang bergerak di bidang usaha peternakan (KUBE Karya Sari):

“Akibat pemotongan yang dilakukan oleh pihak pendamping sangat mengganggu kinerja usaha yang dilakukan masyarakat. Apalagi pemotongannya cukup besar, hingga sangat merugikan masyarakat yang tergabung di dalam KUBE tersebut. Sebagaimana diketahui sejenis usaha yang bergerak dalam bidang peternakan seperti peternakan ayam membutuhkan biaya tambahan sebagai bentuk pemeliharaan dan perawatan sebelum bisa dipetik hasilnya, sehingga dengan adanya pemotongan tersebut membuat usaha kami terhambat.” (wawancara 2012)

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa akibat tidak maksimalnya kunjungan langsung yang dilakukan oleh dinas sosial membuat para pendamping KUBE leluasa melakukan pemotongan dana dengan alasan-alasan tertentu.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang mutu pengawasan Dinas Sosial terhadap Kelompok Usaha Bersama setelah adanya melakukan kunjungan langsung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.16
Tanggapan Responden mengenai Mutu Pengawasan Setelah Adanya Kunjungan Langsung Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	23	45,2%
2	Cukup Efektif	27	52,9%
3	Tidak Efektif	1	1,9%
	Jumlah	51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.16 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana mutu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil setelah adanya melakukan kunjungan langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam melakukan pengawasan terhadap

kelompok usaha bersama, responden yang menjawab Efektif berjumlah 23 orang atau 45,2% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 27 orang atau 52,9%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 1 orang atau 1,9 %.

Berdasarkan tabel 5.16 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Cukup Efektif dalam mutu pengawasan setelah adanya melakukan kunjungan langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama.

3. Mengamati hasil kinerja.

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengamati hasil kinerja dari kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.17
Tanggapan Responden Mengenai Pengamatan Hasil Kinerja yang
Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada
Kelompok Usaha Bersama

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	14	27,5%
2	Cukup Efektif	31	60,8%
3	Tidak Efektif	6	11,7%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.17 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana Dinas Sosial Kab. Inhil dalam mengamati hasil kinerja dari kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan, responden yang menjawab Efektif berjumlah 14 orang atau

27,5% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 31 orang atau 60,8%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 6 orang atau 11,7%.

Berdasarkan tabel 5.17 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil Cukup Efektif dalam mengamati hasil kinerja dari kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan.

Pengamatan hasil kinerja dari kelompok usaha bersama merupakan salah satu bentuk wadah dari informasi-informasi yang dibutuhkan pihak Dinas Sosial mengenai kegiatan kelompok usaha bersama, dengan pengamatan ini tentu akan memudahkan Dinas Sosial dalam memberikan solusi dan perbaikan terhadap kelompok usaha yang bermasalah. Namun berdasarkan observasi yang penulis lakukan terhadap kelompok usaha bersama, khususnya di Kecamatan Tembilahan, banyak kelompok usaha bersama yang mengalami kegagalan, terhitung dari tahun 2004-2009 dari total 49 kelompok usaha yang ada di Kecamatan Tembilahan hanya tersisa 30 kelompok usaha bersama, artinya ada 19 kelompok usaha bersama yang mengalami kegagalan. Berkaitan dengan masalah ini, penulis melakukan wawancara dengan ketua kelompok usaha bersama di Kecamatan Tembilahan yang mengalami kegagalan usaha dibidang perikanan (KUBE Durian Kuning) yaitu bapak Firmansyah Putra, memberikan tanggapannya dalam wawancara dengan penulis, yaitu:

“Banyaknya usaha bersama di Kecamatan Tembilahan yang mengalami kegagalan diakibatkan beberapa faktor, yang pertama karena kurang profesionalnya pihak masyarakat yang mengelola usaha tersebut, sehingga usahanya kalah bersaing dengan usaha-

usaha yang telah ada sebelumnya. Selain itu kurangnya tindakan cepat dari dinas sosial dalam memberikan solusi perbaikan juga menjadi salah satu penyebab kegagalan kelompok usaha bersama tersebut, artinya pihak dinas sosial kurang maksimal dalam mengamati kegiatan usaha bersama, khususnya yang berada di Kecamatan Tembilahan.” (wawancara 2012)

Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis analisis bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, pihak Dinas Sosial harus maksimal dalam melakukan pengamatan hasil kinerja kelompok usaha bersama, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kelompok usaha bersama yang bisa berakibat pada kegagalan usaha yang dijalankan.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang mutu pengawasan Dinas Sosial setelah mengamati hasil kinerja dari kelompok usaha bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.18
Tanggapan Responden mengenai Mutu Pengawasan Setelah Pengamatan Hasil Kinerja dari Kelompok Usaha Bersama Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	18	35,3%
2	Cukup Efektif	29	56,8%
3	Tidak Efektif	4	7,9%
	Jumlah	51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.18 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana mutu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil setelah mengamati hasil kinerja dari kelompok usaha bersama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam melakukan pengawasan, responden yang menjawab Efektif berjumlah 18 orang atau

35,3% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 29 orang atau 56,8%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 4 orang atau 7,9 %.

Berdasarkan tabel 5.18 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Cukup Efektif dalam mutu pengawasan setelah mengamati hasil kinerja kelompok usaha bersama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam melakukan pengawasan.

Salah satu bentuk pengamatan hasil kerja yang dilakukan oleh dinas sosial adalah dengan meminta laporan kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama, dari laporan inilah maka pihak dinas sosial melakukan tindakan evaluasi apabila terjadi permasalahan dalam kelompok usaha bersama. Berdasarkan hasil wawancara penulis mengungkapkan laporan yang diberikan oleh pihak kelompok usaha bersama pada dinas sosial kurang ditindak lanjuti, artinya pihak KUBE merasa bahwa dinas sosial kurang efektif dalam memberikan tindakan evaluasi sehingga usaha yang tergabung dalam KUBE mengalami berbagai masalah, seperti yang dihadapi oleh kelompok usaha Andarista yang bergerak dibidang perbengkelan, dalam wawancara dengan penulis ketua KUBE Andarista mengatakan:

“Laporan kerja yang diminta oleh dinas sosial sudah kami berikan, namun tidak ada tindak lanjut dari laporan tersebut, sehingga permasalahan-permasalahan yang telah kami tulis dalam laporan itu tidak bisa dievaluasi dengan baik, hal ini tentu menyebabkan beberapa KUBE yang mengalami masalah menjadi gagal.”
(wawancara 2012)

Kemudian, untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator variabel Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.19
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi dalam Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama

No	Indikator	Klasifikasi Tanggapan Responden			
		E	CE	TE	Jumlah
1	Laporan Tertulis Baik Rutin Maupun Istimewa	32 (62,8%)	15 (29,4%)	4 (7,8%)	51
2	Mutu Pengawasan Setelah Adanya Laporan Tertulis	36 (70,6%)	14 (27,5%)	1 (1,9%)	51
3	Melakukan Kunjungan Langsung	18 (35,3%)	31 (60,8%)	2 (3,9%)	51
4	Mutu Pengawasan Setelah Adanya Kunjungan Langsung	23 (45,2%)	27 (52,9%)	1 (1,9%)	51
5	Pengamatan Hasil Kinerja	14 (27,5%)	31 (60,8%)	6 (11,7%)	51
6	Mutu Pengawasan Setelah Pengamatan Hasil Kinerja	18 (35,3%)	29 (56,8%)	4 (7,9%)	51
Jumlah		141	147	18	306
Rata-Rata		23,5	24,5	3	51
Persentase		46,1%	48,1%	5,8%	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi dalam

Pengawasan Terhadap Kelompok Usaha Bersama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir yang penulis ajukan kepada responden termasuk dalam kategori Cukup Efektif, yaitu rata-rata jawaban responden sebanyak 24,5 dengan persentase 48,1% dari total 51 responden.

c. Melakukan Tindakan Perbaikan

Melakukan tindakan perbaikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga perlu diadakannya perbaikan dalam pelaksanaan. Tindakan perbaikan ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan.

Kemudian, dibawah ini akan disajikan hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Indragiri Hilir. berdasarkan indikatornya yaitu:

1. Memberi Teguran dan Peringatan Terhadap Penyimpangan.

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan teguran dan peringatan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.20
Tanggapan Responden mengenai Pemberian Teguran dan Peringatan
Terhadap Penyimpangan oleh Kelompok Usaha Bersama Yang
Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	27	52,9%
2	Cukup Efektif	22	43,2%
3	Tidak Efektif	2	3,9%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.20 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana Dinas Sosial Kab. Inhil dalam memberikan teguran dan peringatan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan, responden yang menjawab Efektif berjumlah 27 orang atau 52,9% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 22 orang atau 43,2%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 2 orang atau 3,9 %.

Berdasarkan tabel 5.20 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Efektif dalam memberikan teguran dan peringatan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kelompok usaha bersama, terungkap bahwa ada indikasi pihak dinas sosial tidak maksimal dalam memberikan teguran maupun peringatan, hal ini diungkapkan oleh ketua KUBE Cindy Perabot yang bergerak dibidang usaha Perabot, dalam wawancara dengan penulis beliau mengatakan:

“Belakangan ini terjadi pemotongan dana KUBE, padahal sebelumnya hal seperti ini sama sekali tidak pernah dilakukan. Baru pada akhir-akhir ini ada kegiatan pemotongan yang dilakukan oleh pihak pendamping, seperti yang terjadi di Desa Lahang Hulu bantuan yang didapat berjumlah Rp 120 juta, yang dibagikan secara merata kepada 6 KUBE. Jadi masing KUBE mendapatkan jatah mereka sebesar Rp 20 juta. Uang Rp 20 juta inilah yang akan dipinjam dan diputar oleh setiap anggota KUBE. Akibat dari pemotongan itulah usaha kami menjadi terhambat. Kami mengharapkan pihak dinas sosial memberikan teguran kepada pendamping KUBE yang melakukan pemotongan diluar ketentuan yang berlaku.” (Wawancara 2012)

Dari hasil wawancara diatas, penulis menganalisa bahwa pemberian teguran seharusnya tidak hanya diberikan kepada KUBE namun juga kepada pihak pendamping kube, sehingga program Kube benar-benar tepat guna.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang mutu pengawasan Dinas Sosial Kab. Inhil setelah adanya pemberian teguran dan peringatan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.21
Tanggapan Responden mengenai Mutu Pengawasan Setelah Pemberian Teguran dan Peringatan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	31	60,8%
2	Cukup Efektif	19	37,3%
3	Tidak Efektif	1	1,9%
	Jumlah	51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.21 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana mutu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil setelah pemberian teguran dan peringatan terhadap

penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam melakukan pengawasan, responden yang menjawab Efektif berjumlah 31 orang atau 60,8% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 19 orang atau 37,3%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 1 orang atau 1,9 %.

Berdasarkan tabel 5.21 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Efektif dalam mutu pengawasan setelah adanya pemberian teguran dan peringatan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama dalam melakukan pengawasan.

2. Melakukan Tindakan Perbaikan

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan teguran dan peringatan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.22
Tanggapan Responden mengenai Tindakan Perbaikan Yang
Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	15	29,4%
2	Cukup Efektif	28	54,9%
3	Tidak Efektif	8	15,7%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.22 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana Dinas Sosial Kab. Inhil dalam melakukan tindakan perbaikan terhadap kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan

pengawasan, responden yang menjawab Efektif berjumlah 15 orang atau 29,4% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 28 orang atau 54,9%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 8 orang atau 15,7%.

Berdasarkan tabel 5.22 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Cukup Efektif dalam melakukan tindakan perbaikan terhadap kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian, penulis mencoba mencari tahu pendapat masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha bersama mengenai tindakan perbaikan yang dilakukan oleh dinas sosial, dan sejauh pengamatan panulis, ada perbedaan antara pendapat pegawai dinas sosial dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha bersama, yang mana dalam wawancara dengan penulis, salah satu pengurus inti, yaitu sekretaris kelompok usaha bersama Maju Jaya yang bergerak dibidang Nelayan, bapak Khairul Huda, beliau mengatakan:

“Menurut saya, tindakan perbaikan dari dinas sosial terhadap kelompok usaha yang mengalami masalah bisa dibilang lambat. Ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok usaha yang gagal. Artinya bukan berarti pihak dinas sosial tidak melakukan tindakan perbaikan, namun saya mengatakan tindakan perbaikan tersebut lambat diberikan, hal ini tentu tentu mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan usaha yang mangalami masalah.”(**Wawancara 2012**)

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menganalisis bahwa tindakan perbaikan dari dinas sosial terbilang lambat dalam mengatasi atau memberi solusi pada kelompok usaha bersama, sehingga mengakibatkan

beberapa usaha bersama, khususnya di Kecamatan Tembilahan, banyak yang mengalami kegagalan. Keterlambatan dalam melakukan tindakan perbaikan salah satunya disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan Dinas sosial dalam mengamati hasil kinerja kelompok usaha bersama, seperti hasil wawancara penulis sebelumnya. artinya, penulis menganalisa bahwa tanpa adanya pengamatan hasil kinerja, dinas sosial tidak bisa maksimal dalam memberikan solusi perbaikan dalam masalah yang terjadi di kelompok usaha bersama tersebut.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang mutu pengawasan Dinas Sosial Kab. Inhil setelah melakukan tindakan perbaikan terhadap kelompok usaha bersama dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.23
Tanggapan Responden mengenai Mutu Pengawasan Setelah adanya
Tindakan Perbaikan Terhadap Kelompok Usaha Bersama Yang
Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	19	37,3%
2	Cukup Efektif	26	50,9%
3	Tidak Efektif	6	11,8%
	Jumlah	51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.23 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana mutu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil setelah melakukan tindakan perbaikan terhadap kelompok usaha bersama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam melakukan upaya pengawasan, responden yang menjawab Efektif berjumlah 19 orang

atau 37,3% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 26 orang atau 50,9%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 6 orang atau 11,8%.

Berdasarkan tabel 5.23 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Cukup Efektif dalam mutu pengawasan setelah melakukan tindakan perbaikan terhadap kelompok usaha bersama dalam upaya pengawasan.

Kemudian, untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator Melakukan Tindakan perbaikan dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.24
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Melakukan Tindakan Perbaikan Terhadap Kelompok Usaha Bersama Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Klasifikasi Tanggapan Responden			
		E	CE	TE	Jumlah
1	Pemberian Teguran dan Peringatan Terhadap Penyimpangan	27 (52,9%)	22 (43,2%)	2 (3,9%)	51
2	Mutu Pengawasan Setelah Pemberian Teguran dan Peringatan	31 (60,8%)	19 (37,3%)	1 (1,9%)	51
3	Tindakan Perbaikan	15 (29,4%)	28 (54,9%)	8 (15,7%)	51
4	Mutu Pengawasan Setelah adanya Tindakan Perbaikan	19 (37,3%)	26 (50,9%)	6 (11,8%)	51
Jumlah		92	95	17	204
Jumlah Rata-Rata		23	23,75	4,25	51
Persentase		45,1%	46,6%	8,3%	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator Melakukan Tindakan Perbaikan terhadap Kelompok Usaha Bersama dalam rangka Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir yang penulis ajukan kepada responden termasuk dalam kategori Cukup Efektif, yaitu rata-rata jawaban responden sebanyak 23,75 dengan persentase 46,6% dari total 51 responden.

Adapun untuk melihat rekapitulasi keseluruhan jumlah rata-rata tanggapan responden tentang Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama berdasarkan indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator-indikator Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama

No	Indikator Variabel	Klasifikasi Jumlah Rata-rata Tanggapan Responden			
		E	CE	TE	Jumlah
1	Menetapkan Alat Ukur (Standar)	19,7 (38,7%)	27 (52,9%)	4,3 (8,4%)	51
2	Melakukan Tindakan Penilaian Atau Evaluasi	23,5 (46,1%)	24,5 (48,1%)	3 (5,8%)	51
3	Melakukan Tindakan Perbaikan	23 (45,1%)	23,75 (46,6%)	4,25 (8,3%)	51
Jumlah		66,2	75,25	11,55	153
Jumlah Rata-rata		22,07	25,08	3,85	51
Persentase		43,27%	49,18%	7,55%	100%

Sumber : Data olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas terlihat bahwa jumlah rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Efektif yaitu 22,07 atau dengan persentase 43,27%, kemudian jumlah rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Cukup Efektif yaitu 25,08 dengan persentase 49,18%, sedangkan jumlah rata-rata tanggapan responden yang menyataka Tidak Efektif yaitu 3,85 dengan persentase 7,55%.

Dari penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa secara keseluruhan indikator variabel yang penulis ajukan kepada responden mengenai Efektifitas Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama, termasuk dalam kategori Cukup Efektif, dimana indikator-indikator tersebut meliputi: Menetapkan alat ukur atau standar, Melakukan tindakan penilain atau evaluasi, dan Melakukan tindakan perbaikan.

5.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir.

Efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau dinas terkait tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupeten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama, Faktor-faktor tersebut antara lain Sumber daya Manusia, Dana/Biaya, dan Fasilitas.

Berikut ini akan disajikan data-data penelitian tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pengawasan Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir menurut indikator-indikatornya, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat mempengaruhi proses pengawasan, yang merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kemudian.

Kemudian dibawah ini akan disajikan hasil penelitian penulis mengenai sub-sub indikator dari indikator variabel Sumber daya manusia, yang mana indikator sumber daya manusia adalah salah satu factor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Indragiri Hilir. Sub-sub indikator tersebut yaitu:

1. Kualitas Pelaksanaan Pengawasan.

Kualitas pelaksanaan pengawasan sangat ditentukan oleh faktor sum berdaya manusianya. Artinya, semakin baik kualitas sumber daya manusia yang melakukan pengawasan, tentu akan sejalan dengan kualitas hasil pelaksanaan pengawasan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial

Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kelompok usaha bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.26
Tanggapan Responden mengenai Kualitas Pelaksanaan Pengawasan
Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	32	62,8%
2	Cukup Efektif	17	33,3%
3	Tidak Efektif	2	3,9%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.26 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana Kualitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil terhadap kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan, responden yang menjawab Efektif berjumlah 32 orang atau 62,8% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 17 orang atau 33,3%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 2 orang atau 3,9%.

Berdasarkan tabel 5.26 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Efektif dalam kualitas pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan.

Sesuai dengan hasil kuesioner diatas, penulis mencoba konfirmasi dengan pihak dinas sosial kabupaten indragiri hilir tentang kualitas pengawasan yang dilihat dari sumber daya manusianya, berikut ini petikan wawancara penulis dengan bapak Drs. Masril, MP, yang menjabat sebagai

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir:

“dalam melakukan pengawasan pada Kelompok Usaha Bersama, harus didukung oleh kualitas sumber daya manusianya, artinya pegawai yang melakukan pengawasan harus bersikap profesional. dalam struktur organisasi dikantor ini, saya rasa pegawai yang turun kelapangan sudah baik kualitasnya dalam hal pengawasan pada kelompok usaha bersama, kualitas itu bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya, pengalaman kerja pegawai tersebut, dan profesionalisme pegawai dalam melakukan pekerjaan.”
(wawancara 2012)

2. Jumlah (kuantitas) Pelaksanaan Pengawasan

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang kuantitas atau jumlah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil terhadap kelompok usaha bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.27
Tanggapan Responden mengenai Kuantitas Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	21	41,2%
2	Cukup Efektif	29	56,9%
3	Tidak Efektif	1	1,9%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.27 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana kuantitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil terhadap kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan, responden yang menjawab Efektif berjumlah 21 orang atau 41,2% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 29 orang atau 56,9%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 1 orang atau 1,9 %.

Berdasarkan tabel 5.27 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Cukup Efektif dalam kuantitas pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama dalam upaya melakukan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mencoba melakukan konfirmasi dengan pihak Dinas Sosial tentang berapa jumlah pegawai yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, dari pihak dinas sosial penulis mendapatkan keterangan bahwa jumlah pegawai yang melakukan pengawasan berjumlah 9 pegawai, yang terdiri dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan KAT (Komunitas Adat Terpencil), Seksi Pemberdayaan Sosial, dan 6 orang staf pegawai yang bertugas melakukan pengawasan pada kelompok usaha bersama.

Kemudian, untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator sumber daya manusia dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.28
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Sumber Daya Manusia
Dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Sosial Kabupaten
Indragiri Hilir

No	Indikator	Klasifikasi Tanggapan Responden			
		E	CE	TE	Jumlah
1	Kualitas Pelaksanaan Pengawasan	32 (62,8%)	17 (33,3%)	2 (3,9%)	51
2	Kuantitas Pelaksanaan Pengawasan	21 (41,2%)	29 (56,9%)	1 (1,9%)	51
Jumlah		53	46	3	102
Rata-Rata		26,5	23	1,5	51
Persentase		51,96%	45,09%	2,95%	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator dari sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan Oleh Dinas Sosial Kab. Inhil yang penulis ajukan kepada responden termasuk dalam kategori Efektif, yaitu rata-rata jawaban responden sebanyak 26,5 dengan persentase 51,96% dari total 51 responden.

b. Dana/Biaya

Dana ataupun biaya merupakan faktor penting dalam melakukan suatu pekerjaan seperti melakukan pengawasan, dana atau biaya sangat berperan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dana ataupun biaya juga merupakan salah satu hal yang harus lebih untuk diperhatikan. Tanpa adanya biaya yang memadai, maka tujuan dari pengawasan tidak akan bisa tercapai dengan efektif, jadi dapat dikatakan bahwa dana atau

biaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas dalam pengawasan.

Kemudian dibawah ini akan disajikan hasil penelitian penulis mengenai sub-sub indikator dari indikator variabel Dana atau Biaya , yang mana indikator Dana atau Biaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir. Sub-sub indikator tersebut yaitu:

1. Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan biaya penunjang atau pendukung dalam pelaksanaan pengawasan. Dengan adanya biaya operasional ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama akan bisa berjalan dengan efektif.

Untuk mengetahui bagaimana Biaya Operasional yang dianggarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kelompok usaha bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.29
Tanggapan Responden mengenai Biaya Operasional yang
Dianggarkan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	20	39,2%
2	Cukup Efektif	29	56,9%
3	Tidak Efektif	2	3,9%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.29 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana biaya operasional yang di anggarkan oleh Dinas

Sosial Kab. Inhil dalam melaksanakan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, responden yang menjawab Efektif berjumlah 20 orang atau 39,2% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 29 orang atau 56,9%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 2 orang atau 3,9 %.

Berdasarkan tabel 5.29 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Cukup Efektif dalam menganggarkan biaya operasional dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mencoba melakukan konfirmasi pada pihak dinas sosial mengenai jumlah biaya yang dianggarkan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, dari pihak dinas sosial penulis mendapat keterangan bahwa biaya yang dianggarkan oleh dinas sosial dibagi per kecamatan yang jumlah nominalnya tergantung jarak tempuh kecamatan tersebut. namun secara rinci pihak dinas sosial tidak memberitahukan berapa jumlah yang dianggarkan dalam pelaksanaan pengawasan. Namun jika melihat hasil data kuesioner tanggapan responden memberikan gambaran bahwa jumlah biaya operasional yang dianggarkan termasuk dalam kategori cukup baik.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang biaya operasional yang diberikan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.30
Tanggapan Responden mengenai Biaya Operasional yang Berikan
Dalam Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	18	35,3%
2	Cukup Efektif	31	60,8%
3	Tidak Efektif	2	3,9%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.30 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana biaya operasional yang diberikan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil, responden yang menjawab Efektif berjumlah 18 orang atau 35,3% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 31 orang atau 60,8%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 2 orang atau 3,9 %.

Berdasarkan tabel 5.30 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Cukup Efektif dalam memberikan biaya operasional dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama.

Kemudian, untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator Dana atau Biaya dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.31
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Dana/Biaya Dalam
Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri
Hilir pada kelompok Usaha Bersama

No	Indikator	Klasifikasi Tanggapan Responden			
		E	CE	TE	Jumlah
1	Biaya Operasional	20 (62,8%)	29 (33,3%)	2 (3,9%)	51
2	Biaya Operasional yang Berikan	18 (41,2%)	31 (56,9%)	2 (1,9%)	51
Jumlah		38	60	4	102
Rata-Rata		19	30	2	51
Persentase		37,25%	58,82%	3,93%	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator dari dana atau biaya dalam pelaksanaan pengawasan Oleh Dinas Sosial Kab. Inhil pada Kelompok usaha bersama yang penulis ajukan kepada responden termasuk dalam kategori Cukup Efektif, yaitu rata-rata jawaban responden sebanyak 30 dengan persentase 58,82% dari total 51 responden.

c. Fasilitas

Demi tercapainya tujuan dari pengawasan efektif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama harus ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai. Dengan fasilitas-fasilitas penunjang dalam proses pengawasan maka akan menghasilkan pengawasan yang efektif dan efisien. Adapun penulis akan menyajikan tanggapan responden tentang fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan Pengawasan terhadap Kelompok Usaha Bersama berdasarkan indikatornya, yaitu:

1. Fasilitas Yang Diberikan Oleh Dinas Sosial Kab. Inhil Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelompok Usaha Bersama.

Untuk mengetahui bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kelompok usaha bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.32
Tanggapan Responden mengenai Fasilitas Yang Diberikan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	22	43,2%
2	Cukup Efektif	27	52,9%
3	Tidak Efektif	2	3,9%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.32 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam melaksanakan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, responden yang menjawab Efektif berjumlah 22 orang atau 43,2% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 27 orang atau 52,9%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 2 orang atau 3,9 %.

Berdasarkan tabel 5.32 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Cukup Efektif dalam memberikan fasilitas dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mencoba melakukan konfirmasi dari pihak dinas sosial mengenai fasilitas-fasilitas apasaja yang

diberikan oleh dinas sosial dalam rangka pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, dari pihak dinas sosial memberikan keterangan mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan, antara lain: kendaraan operasional (untuk kecamatan yang berjarak tempuh dekat dan bisa dijangkau kendaraan darat), biaya transportasi (untuk kecamatan yang berjarak tempuh jauh dan harus menggunakan speed boat), fasilitas penginapan bagi pegawai yang membutuhkan waktu beberapa hari dalam pelaksanaan pengawasan.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang kendaraan operasional yang diberikan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5. 33
Tanggapan Responden Mengenai Kendaraan Operasional yang
Berikan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas
Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	24	47,1%
2	Cukup Efektif	25	49,0%
3	Tidak Efektif	2	3,9%
Jumlah		51 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2012

Dari tabel 5.33 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana kendaraan operasional yang diberikan oleh Dinas Sosia Kab. Inhil dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil, responden yang menjawab Efektif berjumlah 24 orang atau 47,1% yang menjawab Cukup Efektif berjumlah 25 orang atau 49,0%, dan yang menjawab Tidak Efektif berjumlah 2 orang atau 3,9 %.

Berdasarkan tabel 5.33 diatas, dapat dilihat jawaban dari responden yaitu didominasi dengan jawaban “Cukup Efektif”, artinya bahwa Dinas Sosial Kab. Inhil dapat dikategorikan Cukup Efektif dalam memberikan kendaraan operasional dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama.

Kemudian, untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator Fasilitas dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kelompok Usaha Bersama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.34
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Fasilitas yang
Diberikan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Klasifikasi Tanggapan Responden			
		E	CE	TE	Jumlah
1	Fasilitas	22 (62,8%)	27 (33,3%)	2 (3,9%)	51
2	Kendaraan Operasional	24 (41,2%)	25 (56,9%)	2 (1,9%)	51
Jumlah		46	52	4	102
Rata-Rata		23	26	2	51
Persentase		45,09%	50,98%	3,93%	100%

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator dari fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Kab. Inhil dalam pelaksanaan pengawasan pada Kelompok usaha bersama yang penulis ajukan kepada responden termasuk dalam kategori Cukup Efektif, yaitu rata-rata jawaban responden sebanyak 26 dengan persentase 50,98% dari total 51 responden.

Kemudian untuk melihat rekapitulasi jumlah rata-rata tanggapan responden tentang factor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama berdasarkan indikator-indikatornya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.35
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Variabel
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Dinas
Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Pada Kelompok Usaha Bersama

No	Indikator Variabel	Klasifikasi Jumlah Rata-rata Tanggapan Responden			
		E	CE	TE	Jumlah
1	Sumber daya Manusia	26,5 (51,96%)	23 (45,09%)	1,5 (2,95%)	51
2	Dana/Biaya	19 (37,25%)	30 (58,82%)	2 (3,93%)	51
3	Fasilitas	23 (45,09%)	26 (50,98%)	2 (3,93%)	51
Jumlah		68,5	79	5,5	153
Jumlah Rata-rata		22,83	26,33	1,84	51
Persentase		44,76%	51,63%	3,61%	100%

Sumber : Data olahan 2012

Dari tabel rekapitulasi diatas terlihat bahwa jumlah rata-rata tanggapan responden yang menyatakan cukup Efektif yaitu 26,33 atau dengan persentase 51,63%, kemudian jumlah rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Efektif yaitu 22,83 dengan persentase 44,76%, sedangkan jumlah rata-rata tanggapan responden yang menyataka Tidak Baik yaitu 1,84 dengan persentase 3,61%.

Dari penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa secara keseluruhan indikator variabel yang penulis ajukan kepada responden mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama, termasuk dalam kategori Cukup Efektif, dimana indikator-indikator tersebut meliputi: Sumber daya manusia, Dana/biaya, dan Fasilitas.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha bersama, Selain ketiga faktor diatas, masih ada terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan, dalam wawancara dengan penulis, bapak Andi Rahman mengatakan:

“menurut pendapat saya, dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, para pegawai yang turun langsung lapangan dipengaruhi oleh faktor kondisi lapangan. maksud saya mengatakan kondisi alam adalah dilihat dari keadaan geografis kabupaten indragiri hilir yang memiliki banyak sungai, artinya jarak kabupaten dengan kecamatan-kecamatanannya terbilang cukup jauh, bahkan ada kecamatan yang berjarak kurang lebih 5 jam dari kabupaten, melihat kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan pada kelompok usaha bersama.”
(Wawancara 2012)

Dari hasil pembahasan data kuesioner dan wawancara yang penulis dapatkan, penulis mencoba menganalisa bahwa selain dari ketiga faktor yang penulis uraikan diatas yaitu sumber daya manusia, biaya, dan fasilitas, terdapat faktor lain yang bisa mempengaruhi pengawasan terhadap kelompok usaha bersama, yaitu faktor kondisi alam atau geografis. Seperti yang diketahui bahwa wilayah kabupaten indragiri hilir terkenal dengan sebutan negeri seribu parit. Jadi dari faktor itulah secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial terhadap kelompok usaha bersama.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasikan dari jawaban responden mengenai Efektifitas Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan pengukuran tiga indikator yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Usaha Bersama berjalan Cukup Efektif. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, masih terdapat beberapa indikasi kurangnya efektifitas pengawasan tersebut, yaitu berkaitan dengan masalah kunjungan langsung, mengamati hasil kinerja, dan membirikan tindakan perbaikan.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dinas Sosial pada kelompok usaha bersama di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Sumber Daya Manusia, Dana/Biaya dan Fasilitas.

6.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir demi tercapainya tujuan pengawasan yang efektif, adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Demi tercapainya pengawasan yang efektif, diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir mengusahakan pengawasan yang berpedoman pada alat ukur yang telah ditetapkan, melakukan tindakan penilaian dan evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan.
2. Diharapkan agar Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir lebih meningkatkan kunjungan-kunjungan langsung pada kelompok usaha bersama, meningkatkan pengamatan hasil kinerja, serta lebih sigap dalam memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kelompok usaha bersama.
3. Agar efektifitas pengawasan dapat tercapai dengan maksimal, diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir lebih memperhatikan lagi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasannya, seperti sumber daya manusia, biaya atau dana, dan fasilitas.
4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menerapkan tegas sanksi kepada penyelenggaraan pengawasan apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

5. Agar program kelompok usaha bersama benar-benar menyentuh ke masyarakat lapisan bawah, diharapkan agar dinas sosial memberikan program usaha kelompok usaha bersama kepada masyarakat yang membutuhkan (masyarakat miskin).

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Sutrisno. 2003. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Pustaka Andi
- Handoko, T. Hani, 2000. *Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Perilaku*, Yogyakarta: BPFE
- _____, 2004. *Manajemen JILID 2*. Yogyakarta: BPFE
- Herujito. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta
- Irawan. 2000. *Pengawasan Perda dan Kepala Daerah*. Jakarta. Bina Aksara
- Kencana, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lubis, Hari dan Huseini Martani. 1998. *Teori Organisasi. Pusat-pusat antar Universitas ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Martono, Nanang, 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M. Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- M, Steers, Richard, 2000. *Efektifitas Organisasi*, Jakarta: Airlangga
- Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Purwanto. 2010. *Statistik Untuk Penelitian*. Purwakarta: Pustaka Belajar
- Rachmawati. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. (ocw,unnes, ac.Id) (file 27-07-2010).
- Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia
- Siagian, Sondang P, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____, 2003. *Filsafat Adminsitasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____, 2004. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sastrohadiwiryo. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Budi
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Persada Quantum
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama
- Syafri, Harahap Syofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Quantum
- Terry, George. 2000, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Wahyudi, Kumorotomo, 2005. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129 / huk / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 24 tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Renstra Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011